Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bandung Barat

LAPORAN AKHIR

Kajian Penyusunan Strategi Daerah
Untuk Meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bandung Barat



2022

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akhir "Kajian Penyusunan Strategi Daerah Untuk Meningkatkan HLS dan RLS di Kabupaten Bandung Barat" dapat kami selesaikan.

Kami sampaikan ucap terimaksih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan laporan ini. Laporan akhir ini kami hadirkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan di masa yang akan datang, sangat kami harapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan pembaca.

Kabupaten Bandung Barat, Juli 2022

Tim Penyusun

bappelitbangda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
BAB - 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 2
1.3 Maksud & Tujuan 3
1.4 Sasaran 4
1.5 Ruang Lingkup 4
1.5.1 Lingkup Kegiatan 4
1.5.2 Lingkup Wilayah Kegiatan 4
1.6 Sistematika Pembahasan 4
BAB - 2 TINJAUAN KEBIJAKAN & TEORI **6**
2.1 Tinjauan Kebijakan 6
2.1.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 6
2.1.2 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Revisi Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 7
2.1.3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat 2007-2025 (Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.3 Tahun 2009) 7
2.1.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat 2018-2023 (Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019) 11
2.2 Tinjauan Teori 14
2.2.1 Harapan Lama Sekolah (HLS) 14
2.2.2 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 16
2.2.3 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi HLS dan RLS 18
2.2.4 Manajemen Pendidikan 19
2.2.5 Programme for International Student Assessment (PISA) 35
2.2.6 Regulasi Strategi Pemerintah dalam Peningkatan Angka Partisipasi Pendidikan Dasar dan Menengah 36
BAB - 3 GAMBARAN UMUM KAB. BANDUNG BARAT **39**

bappelitbangda

3.1 Kondisi Fisik dan Kependudukan 39
3.2 Kondisi Pendidikan 42
3.3 Rata-Rata Lama Sekolah 45
3.4 Angka Putus Sekolah dan Angka Lulusan 46
3.5 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah 48
3.6 Sebaran Sekolah Dasar 49
3.7 Sebaran Sekolah Menengah Pertama 49
3.8 Jumlah Peserta Didik 50
3.9 Jumlah Rombongan Belajar 51
3.10 Jumlah Guru 52
3.11 Kondisi Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat 53
BAB - 4 METODE KAJIAN 57
4.1 Kerangka Pemikiran 57
4.2 Metode Pengumpulan Data 58
4.3 Metode Analisis 60
BAB - 5 ANALISIS HASIL 66
5.1 Analisis 66
5.1.1 Analisis Kekuatan (*Strength*) 66
5.1.2 Analisis Kelemahan (*Weakness*) 67
5.1.3 Analisis Peluang (*Opportunities*) 68
5.1.4 Analisis Ancaman (*Threats*) 70
5.2 Hasil 71
BAB - 6 KESIMPULAN 96

bappelitbangda

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Strategi, dan Arah Kebijakan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 dalam Bidang Pendidikan 14
Tabel 2. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Barat 38
Tabel 3. 1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Bandung Barat Sebelum dan Setelah Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat 40
Tabel 3. 2 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 41
Tabel 3. 3 Perkembangan APS Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 42
Tabel 3. 4 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2021 43
Tabel 3. 5 Perkembangan APM Menurut Jenjang Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2021 43
Tabel 3. 6 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021 44
Tabel 3. 7 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021 45
Tabel 3. 8 Perkembangan Angka Putus Sekolah dan Agka Kelulusan Tahun 2021 46
Tabel 3. 9 Jumlah Murid, Guru, dan Rasio Murid – Guru di Kabupaten Bandung Barat 2020 48
Tabel 3. 10 Jumlah Peserta Didik di Kabupaten Bandung Barat Tahun Ajaran 2020/2022 51
Tabel 3. 11 Jumlah Rombongan Belajar di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 ... 52
Tabel 3. 12 Jumlah Guru di Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 53
Tabel 3. 13 Kemiskinan dan Ketimpangan 2020 54
Tabel 3. 14 Warga Miskin di Kabupaten Bandung Barat 2020 54
Tabel 4. 1 Kebutuhan Data Primer Kegiatan 59
Tabel 4. 2 Diagram Proses Analisis Kasus 61
Tabel 5. 1 Hasil Analisis Kekuatan Kabupaten Bandung Barat 66
Tabel 5. 2 Hasil Analisis Kelemahan Kabupaten Bandung Barat 67
Tabel 5. 3 Hasil Analisis Peluang Kabupaten Bandung Barat 68
Tabel 5. 4 Hasil Analisis Ancaman Kabupaten Bandung Barat 70
Tabel 5. 5 Matriks IFAS (Internal Strategic Factor Analysis Summary) 71
Tabel 5. 6 MATRIKS EFAS (Eksternal Strategic Factor Analysis Summary) 73
Tabel 5. 7 Hasil Analisis Matrik IFAS dan EFAS 80
Tabel 5. 8 Prioritas Strategi Peningkatan Indeks HLS dan RLS 89

bappelitbangda

Tabel 5. 9 Strategi dan Arah Kebijakan dalam meningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) 92

bappelitbangda

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Manajemen Pendidikan 20
Gambar 3. 1 Peta Admiistrasi Kabupaten Bandung Barat 40
Gambar 3. 2 Grafik Capaian Indeks HLS Kabupaten Bandung Barat 2016-2021..... 44
Gambar 3. 3 Grafik Capaian Indeks RLS Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2021 45
Gambar 3. 4 Peta Sebaran Sekolah Dasar (SD)..... 49
Gambar 3. 5 Peta Sebaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) 50
Gambar 4. 1 Kerangka Pemikiran 58
Gambar 4. 2 Unsur-Unsur Analisis Data Dalam Model Alur 64
Gambar 4. 3 Pembagian Hasil Swot Analisis 65
Gambar 4. 4 Analisis Swot..... 65
Gambar 5. 1 Gambar Hasil Analisis SWOT 78
Gambar 5. 2 Timeline Strategi 94

bappelitbangda

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bandung Barat



2022

BAB 1

PENDAHULUAN

Kajian Penyusunan Strategi Daerah
Untuk Meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bandung Barat

BAB - 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat digunakan sebagai penentu keberhasilan pembangunan di suatu wilayah atau negara. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan serta memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Tiiga komponen dasar yang membentuk IPM yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks perekonomian.

IPM mengukur capaian pembangunan manusia yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Untuk mengukur indeks kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur indeks pendidikan digunakan angka Harapan lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Adapun untuk mengukur indeks perekonomian digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pendapatan perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Sejalan dengan pembangunan nasional, untuk mencapai IPM yang diharapkan, Kabupaten Bandung Barat merancang visi dan misi daerah. Visi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 adalah “Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia”. Kabupaten Bandung Barat yang Unggul diwujudkan dengan majunya berbagai unsur yang menunjang dalam pembangunan daerah salah satunya yakni unggul dalam bidang pendidikan. Keunggulan pendidikan dalam suatu daerah dapat dilihat dari besarnya capaian indeks pendidikan yang dihitung dari angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara HLS didefinisikan sebagai rata-rata (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan penduduk sejak umur tertentu.

bappelitbangda

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2021 Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai HLS 11,88 menempati posisi dua terendah dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Jawa Barat. Artinya harapan lama sekolah siswa yang berumur tujuh tahun pada tahun 2021 rata-rata harapan sekolahnya hanya mencapai kelas 2 SMA. Sedangkan indeks nasional HLS Indonesia memperoleh nilai 13,08 artinya rata-rata harapan lama sekolah siswa yang berumur tujuh tahun pada tahun 2021 dapat mencapai tingkat Diploma 1.

Data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 adalah sebesar 8,20 berada di posisi tengah dibandingkan kota/kabupaten lain di Jawa Barat. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas hanya mencapai bangku SMP. Perolehan data tersebut tidak berbeda jauh dengan raihan nasional yang mendapatkan indeks 8,54. Dari perbandingan HLS dan RLS dapat diketahui bahwa Kabupaten Bandung Barat masih mengalami ketertinggalan dalam raihan indeks dibandingkan kota/kabupaten di Indonesia khususnya di Jawa Barat.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memandang perlu melaksanakan kajian penyusunan strategi daerah untuk meningkatkan RLS dan HLS di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, data saat ini menunjukan bahwa kondisi pendidikan di Kabupaten Bandung Barat masih sangat tertinggal, dan memerlukan perhatian yang serius karena sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah dan pembangunan manusia.

Berdasarkan latar belakang di atas, Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat melakukan kajian penyusunan strategi daerah untuk meningkatkan RLS dan HLS yang diharapkan dapat dijadikan dasar kebijakan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Bandung Barat dan mempercepat pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;

bappelitbangda

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
6. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.
7. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembangunan Yang Berkeadilan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023;

1.3 Maksud & Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan Kajian Penyusunan Strategi Daerah Untuk Meningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 adalah :

a. Memberikan gambaran terkait kondisi capaian indeks HLS dan RLS di Kabupaten Bandung Barat.
b. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan nilai indeks RLS dan HLS di Kabupaten Bandung Barat.
c. Merumuskan tahapan, target, dan strategi pencapaian nilai indeks RLS dan HLS di Kabupaten Bandung Barat.
d. Memberikan arah kebijakan dalam upaya peningkatan indeks RLS dan HLS di Kabupaten Bandung Barat.

.

bappelitbangda

1.4 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah dihasilkannya Kajian Penyusunan Strategi Daerah Untuk Meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi dan dimanfaatkan sebagai bahan acuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perumusan kebijakan dalam rangka meningkatkan indeks RLS dan HLS di Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Lingkup Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan Strategi Daerah Untuk Meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Pengumpulan Data Primer (FGD).
- Pengumpulan Data Sekunder (Study Literatur).
- Pengolahan Data dan Analisis.
- Penyusunan Strategi
- Menyusun Laporan.

1.5.2 Lingkup Wilayah Kegiatan

Wilayah kegiatan dilaksanakan di 16 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan lingkup jenjang pendidikan SD negeri dan swasta, serta SMP negeri dan swasta, serta perangkat daerah yang bertanggung jawab dan mengeola pendidikan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam Laporan Antara Kajian Penyusunan Strategi Daerah Untuk Meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, dasar hukum, maksud, tujuan, ruang lingkup dan sistematika penyajian laporan antara.

BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN & TEORI

Bab ini berisikan tinjauan kebijakan dan teori yang terkait dengan penyusunan kajian.

bappelitbangda

BAB 3 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

Berisi tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagai lokasi kajian.

BAB 4 METODE KAJIAN

Bab ini terdiri atas kerangka pemikiran, metode pengumpulan data dan analisis dalam pelaksanaan kajian.

BAB 5 ANALISIS HASIL KAJIAN

Bab ini berisi hasil analisis terhadap kajian yang telah dilakukan.

BAB 6 KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis pada bab sebelumnya.

bappelitbangda

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bandung Barat



2022

BAB 2

TINJAUAN KEBIJAKAN & TEORI

Kajian Penyusunan Strategi Daerah
Untuk Meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bandung Barat

BAB - 2
TINJAUAN KEBIJAKAN & TEORI

2.1 Tinjauan Kebijakan

2.1.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Pendidikan Menengah), Pemerintah Daerah (Pendidikan Dasar), dan/atau masyarakat. Sehingga Pemeritah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikannya masing-masing.

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

bappelitbangda

2.1.2 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Revisi Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan digunakan pada Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada Jalur Pendidikan formal, Jalur Pendidikan nonformal, dan Jalur Pendidikan informal. Standar Nasional Pendidikan mencakup a. standar kompetensi lulusan; b. standar isi; c. standar proses; d. standar penilaian Pendidikan; e. standar tenaga kependidikan; f. standar sarana dan prasarana; g. standar pengelolaan; dan h. standar pembiayaan.

Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pengembangan Standar Nasional Pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu Pendidikan.

Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri terhadap layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh: a. Satuan Pendidikan; b. program pendidikan kesetaraan; c. kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah; dan d. Pemerintah Daerah. Evaluasi dilakukan paling sedikit berdasarkan: a. efektivitas Satuan Pendidikan dalam mengembangkan kompetensi Peserta Didik; b. tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan; c. kualitas dan relevansi proses pembelajaran; d. kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan; dan e. jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

2.1.3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat 2007-2025 (Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.3 Tahun 2009)

Visi pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan penjabaran dari tugas yang dimandatkan oleh rakyat kepada pemerintahan daerah, yaitu dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang “Cerdas, Maju, makmur dan Agamis”. Pengertian dari mandat tersebut adalah sebagai berikut:

bappelitbangda

Cerdas: seluruh komponen sumberdaya manusia di Kabupaten Bandung Barat, baik sumberdaya aparatur maupun masyarakat harus berpendidikan, berakhlak mulia dan memiliki integritas dan berdaya saing.

Maju: seiring dengan bertambahnya waktu, maka Kabupaten Bandung Barat harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan.

Makmur: terpenuhinya berbagai kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, penyelenggaraan pemerintahan maupun hasil pembangunan secara adil dan merata.

Agamis: keyakinan beragama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Visi RPJPD Kabupaten Bandung Barat tersebut adalah “Kabupaten Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan”, dengan pengertian agroindustri adalah peningkatan nilai ekonomis hasil produksi pertanian di Kabupaten Bandung Barat melalui diversifikasi pengolahan hasil-hasil pertanian, dan pengertian wisata ramah lingkungan adalah pengembangan kawasan wisata alam berdasarkan potensi dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan. Kajian lingkungan hidup strategis juga memberikan penguatan pada visi RPJPD Kabupaten Bandung Barat tersebut dengan menambahkan bahwa ke depan Bandung Barat harus sudah menyatakan bahwa sebagian wilayah sudah menjadi kawasan perkotaan.

Untuk mewujudkan mandat dan visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Misi Satu : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan kreatif, adalah terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai oleh meningkatnya semangat kewirausahaan, kreativitas, kompetensi, dan kemandirian yang tinggi di kalangan seluruh komponen sumberdaya manusia Kabupaten Bandung Barat.
2. Misi Dua : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), adalah tercapainya tata kelola pemerintahan yang profesional dengan menjalankan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik yaitu partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (*sustainable*). Tata kelola pemerintahan yang baik bermakna pula tercapainya peningkatan kualitas layanan publik yang didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat.
3. Misi Tiga: Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pengembangan industri yang berdaya saing serta berkeadilan, adalah terwujudnya kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, yang ditandai oleh sistem perekonomian yang

bappelitbangda

berkeadilan dan berdaya saing global, disertai dengan terwujudnya sarana dan prasarana ekonomi yang memadai, tercapainya penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

4. Misi Empat: Memelihara kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, adalah terpeliharanya kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, yang ditandai oleh meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, terkendalinya pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya upaya pengendalian resiko bencana, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup.
5. Misi Lima: Mengintegrasikan kearifan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan, adalah memelihara, menumbuhkembangkan dan membangkitkan kembali nilai-nilai agama dan budaya sebagai acuan dalam pembangunan; baik dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam hubungan antar manusia dan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya.

Berdasarkan misi-misi tersebut, misi “Meningkatnya kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Kreatif” merupakan misi yang sangat berkaitan dengan pengembangan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat. Dengan menelaah misi tersebut diturunkan kedapam strategi dan indikator capaian seperti berikut:

1. Terwujudnya pengendalian pertumbuhan penduduk dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah.
    a) Strategi: mempertahankan kualitas pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi, membatasi urbanisasi dan imigrasi, mendorong transmigrasi lokal dari daerah perkotaan ke perdesaan, menyempurnakan sistem administrasi kependudukan.
    b) Indikator capaian : tersedianya data dasar kependudukan, menurunnya angka fertilitas total < 2,1 menurunnya pertumbuhan alami penduduk mencapai 1,7 %, dan laju pertumbuhan penduduk mencapai < 2,3.
2. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat mencakup semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan dengan memperhatikan kondisi wilayah.
    a) Strategi: Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, meningkatkan anggaran pendidikan, mendirikan SMK bidang pertanian dan pariwisata.

bappelitbangda

b) Indikator Capaian : tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, Kualitas Pelayanan Pendidikan > 75%, anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBD dan lembaga pendidikan diharapkan telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), tersedianya lulusan SMK Pertanian dan Pariwisata.

3. Terwujudnya kualitas pendidikan melalui pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan.
    a) Strategi: melanjutkan peningkatan kualitas tenaga pendidik dengan melakukan sertifikasi guru, meningkatkan tenaga pendidik yang berijazah S1.
    b) Indikator capaian : kualitas Tenaga Pendidik melalui sertifikasi guru > 75% dan Guru Berijazah S-1 < 65%.
4. Meningkatnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan rintisan Wajib Belajar Menengah 12 tahun yang berkualitas
    a) Strategi : membebaskan biaya pendidikan bagi sekolah dasar dan menengah, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan secara merata untuk seluruh wilayah.
    b) Indikator capaian : Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ≥ 10 Tahun,
5. Terwujudnya pemerataan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat,
    a) Strategi : meningkatkan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, meningkatkan kelas rumah sakit daerah, menambah puskesmas dan puskesmas pembantu, meningkatkan kualitas tenaga medis dan paramedis, menambah jenispersediaan obat dan perbekalan kesehatan.
    b) Indikator capaian : meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan, 50% penyusunan sistem jaminan/asuransi kesehatan bagi masyarakat, > 90% fasilitas kesehatan memenuhi SPM kesehatan, Umur Harapan Hidup mencapai > 68,56 dan menurunnya Angka Kematian Bayi = 26/1000, Kelahiran Hidup serta menurunnya Angka Kematian Ibu = 4/10.000 kelahiran hidup.
6. Pemberdayaan perempuan dan pemuda menuju perempuan dan pemuda yang lebih kreatif dan inovatif.
    a) Strategi : menjaga dan terus meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, penurunan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi perempuan, penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, penyediaan data dan statistik gender.

bappelitbangda

Peningkatan pemberdayaan pemuda melalui pembangunan karakter kebangsaan, meningkatkan motivasi agar pemuda siap berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, iptek, politik dan olah raga.

b) Indikator capaian: meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG), meningkatnya kesejahteraan perempuan dan peran serta perempuan dalam proses pembangunan diharapkan > 27% perempuan berpartisipasi di bidang politik, banyaknya pemuda yang berperan dalam pembangunan terutama di bidang sosial budaya, iptek, politik dan olahraga.

2.1.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat 2018-2023 (Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019)

Visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 adalah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana yang disampaikan pada saat proses pemilihan kepala daerah sebelumnya. Visi ini akan menggambarkan arah dan juga kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Visi pembangunan ini juga harus merupakan bagian dari pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan pelaksanaan tahap keempat RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2007 – 2025.

Visi RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 juga harus berkesesuaian dengan kondisi terkini dan tantangan pembangunan ke depan. Setidaknya ada 5 (lima) isu strategis yang sudah dirumuskan sebelumnya yang akan menjadi fokus penanganan pada pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yaitu isu terkait pengembangan SDM, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana, pertumbuhan daya saing ekonomi melalui aksesibilitas wilayah serta tata kelola pemerintahan yang baik. Secara khusus Kabupaten Bandung Barat juga harus memperhatikan pembangunan di Metropolitan Bandung, proyek prioritas strategis Nasional dan Provinsi Jawa Barat yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Dengan memperhatikan pemikiran di atas, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 dirumuskan sebagai berikut:

bappelitbangda

"Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia"

Visi Kabupaten Bandung Barat yang hendak diwujudkan merupakan sebuah kondisi Bandung Barat yang Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius, dengan pengertian sebagai berikut:

Aspiratif

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang aspiratif akan selalu mendengarkan dan menghargai menghargai harapan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan masyarakat, sehingga kemudian pemerintahan dijalankan dengan berpihak pada kebutuhan dan suara masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan suaranya secara langsung, dan juga dapat melalui perwakilannya di DPRD maupun lembaga lainnya seperti lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan.

Kreatif

Penyelenggaraan pemerintahan di Bandung Barat dilaksanakan dengan terobosan dan menggunakan gagasan yang *out of the box* dan orisinil dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat melalui melalui pembangunan yang ramah lingkungan serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.

Unggul

Bandung Barat harus diarahkan agar memiliki kemampuan dan kekuatan berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Bandung Barat sarana prasarana dibangun dengan kualitas baik, SDM pengelola yang berkualitas, pelayanan yang diberikan dengan kualitas terbaik, dan produk yang dihasilkan unggul secara kualitas dan dapat bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional.

Religius

Masyarakat Kabupaten Bandung Barat diharapkan memiliki dan terikat dengan nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama. Nilai dan norma harus senantiasa menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau jiwa bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk pembinaan SDM, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pelaksanaan pembangunan. Kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bandung Barat dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama, serta berbhineka tunggal ika.

Dari Visi tersebut diturunkan kedalam Misi Pembangunan Daerah. Misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 diarahkan untuk memanfaatkan

bappelitbangda

seluruh potensi daerah yang ada, dengan fokus untuk pengembangan agroindustri dan wisata ramah lingkungan dalam rangka menghasilkan pembangunan yang berkualitas menuju masyarakat Bandung Barat yang sejahtera. Misi pembangunan ini tetap dalam kerangka pelaksanaan prioritas pembangunan periode 2018 – 2023 pada RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2007 – 2025.

Secara khusus KLHS sebagai analisis untuk RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023, juga kembali menegaskan perlunya untuk tetap memperhatikan visi RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2007 – 2025. Visi RPJPD tersebut dipandang sudah tepat karena bertolak dari apa yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat dari sisi penggunaan lahan dan mata pencaharian sebagian besar masyarakat setempat di sektor pertanian, Kabupaten Bandung Barat dapat disebut kabupaten agro. Sehingga dinilai tepat apabila ke depannya Kabupaten Bandung Barat dicita-citakan sebagai kabupaten agroindustri, yaitu integrasi pertanian dengan industri.

Di wilayah Kabupaten Bandung Barat juga banyak dijumpai atraksi wisata, dimana untuk memperoleh manfaat nyata atas kehadiran atraksi wisata tersebut perlu menjadi fokus pembangunan di masa datang. Tambahan dari kedua hal yang menjadi visi RPJPD tersebut adalah pengembangan perkotaan yang antara lain terbentuk oleh pembangunan perumahan oleh pengembang swasta.

Di sisi lain perkembangan perkotaan belum menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sosial wilayah Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu meskipun belum dirumuskan sebagai visi Kabupaten Bandung Barat, tetapi perlu disiapkan agar hadir menjadi wilayah perkotaan yang terpadu, efisien, inklusif dan menjadi pendorong perkembangan sosial ekonomi wilayah.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan di atas, dengan menggunakan dasar pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka misi pembangunan Bandung Barat 2018 – 2023 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi.

bappelitbangda

Dari Penjabaran Visi dan Misi tersebut, Kabupaten Bandung Barat mempunyai ambisi untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Namun temuan di lapangan terdapat beberapa masalah yang ditemui dan sangat menghambat peningkatan kualitas mutu pendidikan. Kendala tersebut diantaranya:

a. Masih kurangnya fasilitas pendidikan yang berkualitas baik dan merata di semua kecamatan.
b. Rendahnya angka partisipasi untuk jenjang pendidikan menengah atas.
c. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah (50% penduduk belum tamat SD dan hanya tamat SD).
d. Masih kurangnya kesadaran pada sebagian masyarakat akan pentingnya meraih pendidikan tinggi.
e. Masih kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin
f. Belum seimbangnya perkembangan sistem pendidikan formal non formal dan informal.
g. Penghargaan untuk pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah daerah memetakan beberapa strategi yang diturunkan dari Visi dan Misi Daerah untuk menanggulangi permasalahan tersebut, berikut pemetaan strategi Pemerintah Daerah guna mengatasi permasalahan dalam bidang pendidikan:

Tabel 2. 1 Strategi, dan Arah Kebijakan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 dalam Bidang Pendidikan

TUJUAN	Sasaran / Indikator Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Visi	Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), berbasis pada pengembangan ekonomi, Optimalisasi Sumber daya Alam dan Kualitas sumber daya manusia.			
Misi 1	Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas			
Tujuan 1.1 Meningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat	1.1.1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan, dengan indikator : a. Indeks pendidikan	Menciptakan masyarakat yang sehat, berdaya saing dan berkarakter dengan penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan secara berkualitas dan merata (54)	1. Meningkatkan Penyediaan layanan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai – nilai lokal, agama, dan kebangsaan
	1.1.2	Meningkatkan Minat Budaya Baca, dengan indikator a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Menciptakan masyarakat yang sehat, berdaya saing dan berkarakter dengan penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan secara berkualitas dan merata (54)	

Sumber: RJPMD 2018-2023

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. Karena HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk di mulai pada usia tujuh tahun.

bappelitbangda

Secara sederhana, HLS dapat didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal. HLS merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Angka harapan lama sekolah di hitung pada anak yang usia 7 tahun keatas. Langkah perhitungan RLS dengan menghitung banyaknyapenduduk yang menurut umur 7 tahun keatas, kemudian menghitung banyaknya penduduk yang masih sekolah menurut umur 7 tahun keatas. Setelah itu, menghitung rasio penduduk masih sekolah menurut umur 7 tahun keatas dan menghitung harapan lama sekolah. Dengan menjumlahkan formula sebagai berikut :

$$EYS_a^t = FKx\sum_{i=a}^{n}\frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Di mana :

EYS_a^t : Harapan lama sekolah pada umur ɑ di tahun t Et

E_i^t : Jumlah penduduk usiai yang ber sekolah pada tahun t Pt

P_i^t: Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i : Usia (a, a+1, ..., n)

FK : Faktor Koreksi

Dari perhitungan rumus tersebut makan akan muncul nilai indeks besar harapan seseorang mengenyam bangku pendidikan di wilayah tertentu, berikut angka harapan lama sekolah di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2. 2 Angka Harapan Lama Sekolah Di kota/kabupaten Provinsi Jawa Barat

Kode	Wilayah Jawa Barat	Harapan Lama Sekolah					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0000	Nasional	12.72	12.85	12.91	12.95	12.98	13.08
3200	Provinsi Jawa Barat	12.30	12.42	12.45	12.48	12.50	12.61
3201	Bogor	12.05	12.43	12.44	12.47	12.48	12.49
3202	Sukabumi	12.18	12.19	12.20	12.22	12.23	12.24
3203	Cianjur	11.88	11.89	11.90	11.98	11.99	12.00
3204	Bandung	12.42	12.43	12.64	12.68	12.69	12.70
3205	Garut	11.69	11.73	11.80	11.82	11.91	12.03
3206	Tasikmalaya	12.46	12.47	12.48	12.52	12.53	12.54
3207	Ciamis	13.65	13.66	13.67	13.79	14.06	14.20
3208	Kuningan	12.04	12.06	12.07	12.10	12.22	12.23
3209	Cirebon	12.03	12.21	12.22	12.24	12.25	12.27
3210	Majalengka	11.89	12.18	12.19	12.21	12.22	12.23

litbangda

Kode	Wilayah Jawa Barat	Harapan Lama Sekolah					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3211	Sumedang	12.91	12.93	12.94	12.96	12.97	12.98
3212	Indramayu	12.20	12.21	12.22	12.24	12.25	12.26
3213	Subang	11.66	11.67	11.68	11.69	11.70	11.71
3214	Purwakarta	11.82	11.89	12.09	12.10	12.11	12.12
3215	Karawang	11.85	11.96	12.07	12.08	12.09	12.10
3216	Bekasi	12.23	12.63	13.05	13.08	13.09	13.10
3217	Bandung Barat	11.56	11.79	11.83	11.86	11.87	11.88
3218	Pangandaran	12.02	12.03	12.04	12.06	12.07	12.08
3271	Kota Bogor	13.01	13.37	13.38	13.40	13.41	13.42
3272	Kota Sukabumi	13.38	13.39	13.40	13.46	13.47	13.58
3273	Kota Bandung	13.89	13.90	14.18	14.19	14.20	14.21
3274	Kota Cirebon	13.07	13.08	13.09	13.11	13.12	13.13
3275	Kota Bekasi	13.47	13.51	13.76	13.99	14.00	14.10
3276	Kota Depok	13.86	13.87	13.90	13.91	13.92	13.93
3277	Kota Cimahi	13.75	13.76	13.77	13.79	13.80	13.81
3278	Kota Tasikmalaya	13.40	13.41	13.42	13.44	13.45	13.46
3279	Kota Banjar	13.18	13.19	13.20	13.22	13.23	13.24

Sumber : BPS Jawa Barat

2.2.2 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi (Bappenas, 2014). Salah satu konsep pembangunan manusia adalah pengembangan pengetahuan penduduk melalui peningkatan angka ratarata lama sekolah (UNDP, 1995). Angka rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan 8 agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya, mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk diperhitungkan rata-rata lama sekolahnya.

Indikator RLS dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. RLS dihitung secara tidak langsung, pertama-tama dengan memberikan Faktor Konversi pada variabel "Pendidikan yang Ditamatkan" sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3

bappelitbangda

Tabel 2. 3 Faktor Konversi pada variabel "Pendidikan yang Ditamatkan"

No	Jenjang Pendidikan	Faktor Konversi
1	Tidak, belum pernah sekolah	0
2	Belum tamat SD	3
3	Tamat SD sederajat	6
4	Tamat SLTP	9
5	Tamat SLTA	12
6	Tamat D I	13
7	Tamat D II	14
8	Tamat D III/Sarjana Muda/Akademi	15
9	Tamat D IV/Sarjana	16
10	Tamat S2	18
11	Tamat S3	21

Langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata dari variabel tersebut sesuai dengan bobotnya. Cerminan angka RLS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

$$RLS = \frac{\Sigma fi \; x \; si}{\Sigma fi}$$

RLS : Rata – Rata Lama Sekolah

Fi: Frekuensi penduduk berumur 10 tahun ke atas pada jenjang pendidikan i, i = 1,2,…,11

Si**:** Skor masing-masing jenjang pendidikan

Dari perhitungan rumus tersebut makan akan muncul nilai indeks besar harapan seseorang mengenyam bangku pendidikan di wilayah tertentu, berikut angka harapan lama sekolah di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2. 4 Angka RLS Di kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat

Kode	Kab/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0000	**NASIONAL**	**7,95**	**8,10**	**8,17**	**8,34**	**8,48**	**8,54**
3200	**JAWA BARAT**	**7,95**	**8,14**	**8,15**	**8,37**	**8,55**	**8,61**
3201	Bogor	7,83	7,84	7,88	8,29	8,3	3,3
3202	Sukabumi	6,74	6,79	6,80	7,02	7,07	7,1
3203	Cianjur	6,61	6,92	6,93	6,97	7,18	7,19
3204	Bandung	8,50	8,51	8,58	8,79	8,96	9,07
3205	Garut	6,88	7,28	7,50	7,51	7,52	7,53
3206	Tasikmalaya	6,94	7,12	7,13	7,17	7,35	7,71
3207	Ciamis	7,55	7,59	7,60	7,69	7,7	8,31
3208	Kuningan	7,34	7,35	7,36	7,38	7,57	7,8

kappelitbang.ja

Kode	Kab/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3209	Cirebon	6,41	6,61	6,62	6,71	6,92	7,1
3210	Majalengka	6,89	6,90	6,91	7,09	7,27	7,31
3211	Sumedang	7,72	7,98	8,17	8,27	8,51	8,51
3212	Indramayu	5,56	5,97	5,98	5,99	6,3	6,52
3213	Subang	6,58	6,83	6,84	6,85	7,1	7,11
3214	Purwakarta	7,42	7,74	7,75	7,92	8,09	8,1
3215	Karawang	6,94	7,34	7,35	7,65	7,77	7,78
3216	Bekasi	8,81	8,82	8,84	8,84	9,12	9,3
3217	Bandung Barat	7,63	7,74	7,97	8,18	8,19	8,2
3218	Pangandaran	7,07	7,37	7,58	7,67	7,74	7,85
3271	Kota Bogor	10,28	10,29	10,30	10,32	10,33	10,53
3272	Kota Sukabumi	9,28	9,52	9,53	9,58	9,59	9,81
3273	Kota Bandung	10,58	10,59	10,63	10,74	10,75	10,99
3274	Kota Cirebon	9,87	9,88	9,89	9,9	9,91	10,12
3275	Kota Bekasi	10,78	10,93	11,09	11,1	11,16	11,31
3276	Kota Depok	10,76	10,84	10,85	11	11,28	11,46
3277	Kota Cimahi	10,89	10,93	10,94	10,95	10,96	11,08
3278	Kota Tasikmalaya	8,63	9,03	9,04	9,13	9,33	9,52
3279	Kota Banjar	8,19	8,59	8,60	8,62	8,63	8,77

Sumber: BPS Jawa Barat

2.2.3 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi HLS dan RLS

Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh penduduk di suatu daerah. Berarti semakin tinggi RLS dan HLS maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani dan semakin tinggi pula kualitas seseorang dalam pola pikir maupun pola tindakannya. RLS seseorang sangat dipengaruhi oleh perbedaan upah atau pendapatan antara sektor modern dengan sektor tradisional, probabilitas keberhasilan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern dengan adanya pendidikan, biaya pendidikan langsung yang harus ditanggung siswa/keluarganya, dan biaya tidak langsung dari pendidikan, pendapat lain juga menyimpulkan bahwa RLS dipengaruhi tingkat kemiskinan, beban ketergantungan, dan tempat tinggal.

Merujuk beberapa hasil penelitian dan kajian yang pernah dilakukan sebelumnya terdapat beberapa faktor yang secara signifikan memperngaruhi HLS dan RLS, yaitu:

1. Biaya Pendidikan Meskipun saat ini Pemerintah telah mengalokasikan dana BOS (Belanja Operasional Sekolah), BAUSKM (Bantuan Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin), maupun pemberian beasiswa, namun sebagian besar masyarakat masih

bappelitbangda

merasakan beratnya kebutuhan untuk memenuhi biaya pendidikan, baik dalam bentuk iuran komite sekolah, pakaian seragam, buku pelajaran, dan lainnya.

2. Kemiskinan Tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah juga berdampak signifikan terhadap tingginya angka putus sekolah. Hal ini menyebabkan anak usia sekolah yang seharusnya duduk dibangku sekolah terpaksa bekerja membantu perekonomian keluarga.
3. Angka Ketergantungan (dependency ratio) Besarnya jumlah anggota keluarga/angka ketergantungan juga mempengaruhi peluang seorang anak untuk dapat meneruskan pendidikannya.
4. Tempat Tinggal (akses) Tidak meratanya lokasi tempat tinggal penduduk khususnya di wilayah yang memiliki aksesibilitas terbatas menyebabkan biaya tinggi untuk transportasi anak untuk sampai ke sekolah.

2.2.4 Manajemen Pendidikan

2.2.1.1 Konsep Dasar Manajemen Pendidikan Dalam Pembangunan Kualitas Pendidikan

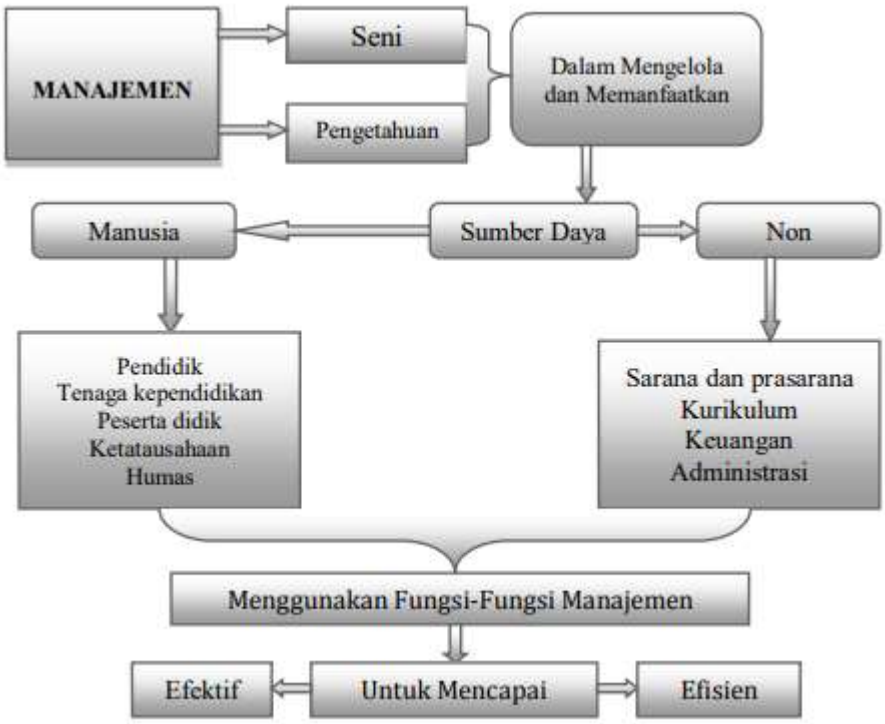
Manajemen pendidikan sangat penting karena pendidikan tidak semata-mata memenuhi kebutuhan dasar manusia Indonesia, akan tetapi merupakan salah satu dinamisator pembangunan. Oleh karena itu manajemen pendidikan haruslah merupakan subsistem dari sistem manajemen pembangunan nasional. Manajemen pendidikan merupakan suatu proses untuk mengkoordinasi-kan berbagai sumber daya pendidikan diantaranya guru, sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Manajemen Pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien (Kristiawan, 2017).

bappelitbangda

Manajemen pendidikan dapat dinyatakan sebagai upaya menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Menurut Dudung A. Dasuqi dan Setyo Somantri dikutip dari Nan Rahminawati (2021) menyebutkan bahwa: Administrasi sebelum diterapkan dalam suatu obyek tertentu atau diberi predikat tertentu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang:

1. ***Dari sudut proses***, pengertian administrasi dapat dinyatakan sebagai *keseluruhan tingkat yang dilalui dari mulai proses pengambilan keputusan, penentuan tujuan, pembagian tugas dan pelaksanaan kerja sampai tujuan yang telah dirumuskan terwujud.*
2. ***Dari sudut fungsi atau tugas*** yang harus dilaksanakan, administrasi dapat dinyatakan sebagai *kerja yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok orang yang diawali dengan pengambilan keputusan, penentuan tujuan, pelaksanaan dan pembagian tugas sampai mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan.*
3. ***Dari sudut kelembagaan***, administrasi dapat dinyatakan sebagai *individu atau kelompok yang menjalankan tugas dimulai sejak pengambilan keputusan, penentuan tujuan, pelaksanaan dan pembagian tugas sampai mewujudkan tujuan yang telah disepakati bersama.*



Gambar 2. 1 Skema Manajemen Pendidikan

Untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam manajemen, maka segala tindakan dan kegiatan harus atau sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan atau perhitungan yang rasional. Sehubungan dengan pemikiran tersebut, maka diperlukan langkah kegiatan dengan perumusannya secara jelas dan tegas, agar antara langkah yang satu dengan langkah yang lainnya tidak rancu adanya. Rumusan dari langkah-langkah tersebut disebut fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu merupakan pemuatan pengarahan mental (pikiran, kemauan, dan perasaan) dan tenaga jasmaniah untuk mewujudkan sesuatu sebagai sasaran. Sasaran itu telah direncanakan sebelumnya. Dengan demikian fungsi manajemen itu merupakan sesuatu dari kegiatan yang menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam melaksanakan berbagai aktivitas lembaga, proses manajemen merupakan suatu keniscayaan untuk mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan. Proses berarti serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai berakhirnya sasaran / tercapainya tujuan. Sehubungan dengan hal itu, maka dibutuhkan berbagai fungsi administrasi. Fungsi adalah tugas / kegiatan. Perkataan proses dan fungsi dalam hal ini tampaknya mempunyai pengertian yang sama, misalnya: W.H.Newman, L.Gullick, G.Terry menyebut proses administrasi / management. Mc.Farland, Koontz, F.Taylor menyebut fungsi administrasi / management. H. Fayol menyebut pengertian yang sama yaitu proses / fungsi adalah unsur (elements).

Dikutip dari Nan Rahminawati, William H.Newman menyebutkan bahwa "*The work of Administartor / Manager*". Dapat dibagi dalam 5 proses: "*Planning, organizing, assembling resources, supervising, controlling*". Menurut Dalton E.Mc.Farland dalam bukunya Management Principles and Practies, menyebutkan bahwa "*The function of executive / management*" terbagi ke dalam 3 fungsi: "*Planning, organizing, and controlling*". Sedangkan George Terry dalam bukunya: principles of Management menggunakan proses manajemen, yang terdiri atas: "*planning, organizing, actuating, and controlling*".

Proses kegiatan tersebut, pada pokoknya berdasarkan kepada tiga macam fungsi manajemen. JF.Tahalele dan Soekarto Indrafachrudi menyebutkan bahwa fungsi manajemen itu antara lain: "*(1) perencanaan (planning), (2) pelaksanaan (execution), dan (3) penilaian (evaluation)"*.

Dilihat dari sudut perkembangan administrasi sebagai ilmu, maka klasifikasi fungsi-fungsi manajemen ternyata berkembang sesuai latar belakang

bappelitbangda

kondisi masyarakat dengan pandangan hidupnya, serta alam pikiran dari seorang teoritikus. Sebagai contoh, dapat dilihat dari dua kutub kondisi pandangan hidup masyarakat dalam negara yang sangat berbeda, yaitu:

1. Pada waktu negara Perancis dalam kondisi militeristis, maka Henry Fayol seorang ilmuwan dalam manajemen menyusun buku: “General and Industrial Management“ (1916). Ia mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut: “*planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling”*.
2. Tokoh ilmuwan di bidang manajemen dari negara Amerika Serikat (yang terkenal dengan system pemerintahan demokrasi liberal) yaitu Prof. John F.Mee sebagai pembina mata kuliah Filsafat Manajemen di Universitas Indiana, ia mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut: “*planning, organizing, motivating, and controlling*”.

Pada teori fungsi Henry Fayol, ternyata istilah “*commanding*” sangat cocok dengan kondisi yang otoriter, sedangkan pada teori fungsi John F.Mee mempergunakan istilah “*motivating*” berati menggunakan pendekatan psikologis yang berorientasi pada “human needs”. Hal ini cocok dengan kondisi pemerintahan “demokrasi liberal”. Dalam kondisi seperti di atas, pertumbuhan individu berkembang berikut kreativitasnya, inisiatifnya, dan sebagainya.

Fungsi manajemen yang pertama perlu diungkap adalah **planning (perencanaan)**, yang oleh seluruh ahli ditempatkan pada urutan pertama. Merencanakan dalam kehidupan sehari-hari dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang cerdas dan bermanfaat bagi tindakan yang akan dilakukan. Perencanaan secara umum dapat dirumuskan sebagai suatu cara merumuskan tujuan-tujuan dan teknik-teknik untuk mewujudkan tujuan tersebut. Perumusan manapun yang kita gunakan perencanaan, menurut Dudung A.Dasuki dan Setyo Somantri mengandung unsur-unsur :

1. proses yang mengandung arti kegiatan yang terus menerus dan bertahap. Tahap-tahap kegiatan tersebut selalu berpedoman pada tujuan yang akan dicapai.
2. Menyiapkan, tidak dihiraukan benar apakah kegiatan tersebut tunggal atau kegiatan tersebut ganda dalam arti seperangkat. Kegiatan yang dipersiapkan dapat berbeda saling menunjang atau kegiatan yang satu menentukan kegiatan yang lain.
3. Menetapkan atau merumuskan kegiatan. Yang menjadi tujuan utama perencanaan adalah keputusan mengenai tindakan yang akan dilakukan

bappelitbangda

dan memang perencanaan adalah berisi keputusan tentang tindakan-tindakan yang akan dilakukan.

4. Sedikit ketidak pastian, sebab tidak semua hambatan pada masa yang akan datang dapat diperhitungkan secara pasti dan cara atau teknik mana yang paling tepat yang dapat dipilih.
5. Masa yang akan datang yang tidak dapat diramalkan setepat mungkin, dengan cara atau teknik yang teramalkan setepatnya, sebab kemungkinan yang tidak bisa diperhitungkan selalu ada.
6. Optimalisasi perhitungan, dengan teknik yang telah diketahui. Hal ini untuk menjaga dan menghalangi kemungkinan gagal seminimal mungkin.

Karena unsur-unsur di atas, maka rencana memiliki sifat-sifat sebagai berikut.

1. Dapat diterima oleh semua pihak (*adopted*). Sifat ini menuntut rencana harus memiliki unsure rasional dan disetujui demi kepentingan bersama.
2. Lentur (*flexible*) karena masa depan penuh kekurang pastian. Rencana harus berani mengubah cara atau teknik yang akan dilakukan lebih-lebih tujuan akan diwujudkan.
3. Ilmiah (*scientific*). Rencana tidak boleh subyektif, tapi harus berdasarkan kebutuhan dan informasi yang ada dan akurat. Alur perencanaan yang harus diikuti di bawah ini dapat menimbulkan bahwa pengelolaan sebagai proses karena rencana juga merupakan suatu proses:
    a. pra rencana yang berisi:
        1) pengumpulan dan pengolahan data
        2) diagnosis dan prognosis keadaan
        3) perumusan kebijakan
        4) estimai kebutuhan
        5) menganggarkan kebutuhan
        6) memilih sasaran.
    b. Merumuskan Rencana
    c. Perincian Rencana
    d. Implementasi Rencana
    e. Evaluasi Rencana
    f. Revisi dan Perencanaan Kembali.

Fungsi manajemen lainnya, yakni: **Mengorganisasikan, mengkomunikasikan serta mengkoordinasikan**, masuk dalam kelompok besar dari fungsi **melaksanakan**. Pelaksanaan program merupakan penjabaran

bappelitbangda

dari perencanaan program yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam suatu organisasi, tahap pelaksanaan program akan senantiasa diupayakan dengan cara mengorganisasikan, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan berbagai rencana yang disepakati.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen di atas, pimpinan lembaga memerlukan sarana dan prasarana, diantaranya memerlukan wewenang, kekuasaan, tujuan, orientasi, manusia, serta sumber daya lainnya. Kekuasaan dibutuhkan oleh seorang pimpinan organisasi untuk mempengaruhi orang lain. Sedangkan wewenang merupakan hak kelembagaan menggunakan kekuasaan. Menurut Mac Weber (1974) yang dikutip Nanang Fattah (2000:75) bahwa "*wewenang itu bermacam-macam, ada wewenang rasional, hukum, tradisi, dan kharismatik"*. Perlu diperhatikan bahwa wewenang formal/kelembagaan tidak selamanya efektif untuk mempengaruhi orang lain. Hal tersebut sangat tergantung pada kehendak atau kesediaan para anggota organisasi, apakah mau tunduk.

Wewenang tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan dalam arti yang sebenarnya adalah kekuatan untuk mengendalikan orang lain sehingga orang lain sama sekali tidak punya pilihan, karena tidak berdaya untuk menentukan diri sendiri, atau tidak mengetahui bagaimana memperoleh sumber daya yang mereka perlukan. Kekuasaan tidak hanya diperoleh semata-mata dari tingkatan seseorang dalam hirarki organisasi, tetapi bersumber dari bermacam-macam jenis psikologis kekuasaan, seperti dikemukakan Edgard H. Schein yang dikutip dari Nan Rahminawati (2021), di antaranya:

1. *legitimate power*; kekuasaan formal yang terjadi karena suatu posisi atau jabatan tertentu. Kekuasaan ini terjadi apabila bawahan menerima pengaruh mengakui atasan secara sah, dan berhak untuk memerintah atau memberi pengaruh dalam batas-batas tertentu. Ini berarti bawahan mempunyai kewajiban untuk mengakui kekuasaan.
2. *coercive power*; yakni kekuasaan untuk memaksa atau menghukum. Kekuasaan ini didasarkan pada kemampuan pemberi pengaruh untuk menghukum penerima pengaruh kalau tidak memenuhi permintaan. Hukuman dapat berupa kehilangan fasilitas bahkan kehilangan pekerjaan. Kekuasaan ini biasanya dilakukan untuk mempertahankan prestasi minimum atau kepatuhan bawahan.
3. *reward power*; yakni kekuasaan untuk memberikan penghargaan. Kekuasaan ini didasarkan pada kemampuan untuk memberi imbalan

bappelitbangda

kepada orang lain. Makin besar kekuasaan, makin besar pengaruh yang memberi perintah.

4. *reference power*; yakni kekuasaan / kekuatan yang bisa menyebabkan orang lain mengikuti atau melakukan peniruan. Kekuasaan ini didasarkan pada keinginan penerima pengaruh untuk meniru pemberi pengaruh. Kekuasaan ini berhubungan dengan faktor-faktor seperti gengsi, kekaguman, kebanggaan penerima pengaruh atas pemberi pengaruh sebagai figure atau tokoh idola.
5. *expert power*; yakni kekuasaan yang ditimbulkan oleh keunggulan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan. Kekuasaan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pemberi pengaruh mempunyai keahlian yang relevan dan tidak dimiliki oleh penerima pengaruh. Misalnya, jika seseorang pasien melakukan apa saja yang diperintahkan seorang dokter, berarti mengakui kekuasaan keahliannya.
6. *Personality power,* yakni kekuasaan yang timbul dari pribadi seseorang. Kekuasaan ini didasarkan pada kualitas pribadi yang memberi pengaruh, misalnya kharisma/magis pimpinan, seperti Rasulullah Muhammad Saw., mendapat tanggapan emosional yang sangat besar dari pengkutnya. Beliau dapat membuat para pengikutnya melakukan hal-hal yang tidak biasa mereka lakukan, semata-mata karena kekuatan pribadinya.

2.2.1.2 Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan Penunjang Peningkatan HLS dan RSL

Dikutip dari Nan Rahminawati, Mengelola sekolah dapat diartikan sebagai "proses mengatur semua potensi sekolah agar berfungsi secara optimal, sehingga tercapai tujuan sekolah. Unit-unit pekerjaan di sekolah merupakan sejumlah pengelolaan yang akan memberikan kontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan tugas utama, ialah program pendidikan dan pengajaran (pembelajaran) yang dilaksanakan di sekolah. Sehingga, penetapan prioritas ada pada minat dan kebutuhan siswa. Ruang lingkup Manajemen Pendidikan diantaranya sebagai berikut.

A. Pengelolaan Kurikulum

Pengelolaan pembelajaran seringkali disebut dengan pengelolaan kurikulum. Oleh karena itu pengelolaan kurikulum dimaknai sebagai *pengaturan semua kegiatan pembelajaran, baik yang dikategrorikan berdasarkan kurikulum inti maupun penunjang berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Departemen Pendidikan Nasional dan atau lembaga tertentu*.

bappelitbangda

Pada umumnya kurikulum dipandang sebagai *"rencana"* yang disusun untuk kesuksesan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggungjawab sekolah atau lembaga pendidikan dengan seluruh pengajarannya. Para pakar teori kurikulum berpendapat pula bahwa kurikulum selain dari pada semua kegiatan yang telah direncanakan juga mencakup kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah pengawasan sekolah. Jadi selain kegiatan kurikuler yang formal, juga yang tidak formal. Yang tidak formal itu disebut kegiatan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler. Walaupun kegiatan-kegiatan itu direncanakan tapi tidak langsung berkaitan dengan pelajaran akademis di kelas-kelas tertentu.

Pengelolaan kurikulum bertujuan untuk *menciptakan proses pembelajaran yang mudah direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan baik secara efektif dan efisien*. Efektif berarti membelajarkan peserta didik sesuai dengan apa yang seharusnya dikembangkan di setiap jenjang pendidikan. Sementara yang dimaksud dengan efisien adalah mendayagunakan tenaga, waktu, biaya, ruang atau gedung, dan fasilitas pendidikan lainnya sehemat mungkin.

B. Pengelolaan Peserta Didik

Pengelolaan peserta didik merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik dari suatu institusi pendidikan. Yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan peserta didik ini adalah bukan hanya menyangkut aspek administratif semata, tetapi harus pula memperhatikan aspek lainnya yang lebih luas yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah.

Adapun tujuan dari pengelolaan peserta didik adalah untuk:

1. Memperlancar pelaksanaan perencanaan peserta didik sehingga sedini mungkin dapat diupayakan persiapan penerimaan siswa baru.
2. Memberikan pelayanan pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan karakteristik siswa yang dilayani, seperti layanan kesehatan dan layanan transportasi.
3. Menciptakan suasana dan lingkungan sekolah yang tertib dan aman sehingga kepribadian peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
4. Mempermudah kegiatan-kegiatan pelaporan mengenai peserta didik.

bappelitbangda

Sementara dikutip dari Nan Rahminawati, E. Mulyasa mengemukakan tujuan pengelolaan peserta didik adalah: " *untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancer, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah".* Agar tujuan tersebut dapat dicapai secara optimal, maka kepala sekolah dalam pengelolaan kesiswaan ini memiliki tanggung jawab dalam hal:

1. Kehadiran siswa di sekolah dan masalah-masalah yang berhubungan dengan itu;
2. Penerimaan, orientasi, klasifikasi, dan penunjukkan siswa ke kelas dan program studi;
3. Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar;
4. Program pengawasan bagi siswa yang mempunyai kelainan, seperti pengajaran, perbaikan, dan pengajaran luar biasa;
5. Pengendalian disiplin siswa;
6. Program bimbingan dan penyuluhan;
7. Program kesehatan dan keamanan;
8. Penyesuaian pribadi, social, dan emosional.

C. Pengelolaan Administrasi

Pendidikan merupakan kewajiban yang perlu dperhatikan berbagai stakeholdernya (antara lain: pemerintah, masyarakat, dan keluarga), termasuk dalam penyelenggaraan dan pengelolaannya. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan, diperlukan biaya. Menurut Hallak yang dikutip dari Nan Rahminawati (2021) dalam Analisis Biaya Pendidikan, yang dimaksud "*biaya adalah bentuk uang/moneter"*. Sementara Zymelman dengan jelas mengatakan bahwa "*pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber dana tetapi juga menyangkut penggunaan dana-dana itu secara efisien"*. Makin efisien suatu system pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan itu. Ketersediaan dana merupakan salah satu syarat untuk dapat dilakukannya berbagai kegiatan pendidikan.

Pengelolaan keuangan pendidikan lebih difokuskan dalam proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan, serta mengawasi pelaksanaan penggunaan dana, baik untuk biaya operasional maupun biaya kapital, disertai bukti-bukti secara administratif dan fisik (material) sesuai dengan dana yang dikeluarkan.

bappelitbangda

Secara sederhana pengelolaan dana pendidikan itu mencakup dua aspek, yaitu: (a) dimensi penerimaan atau sumber dana, dan (b) dimensi pengeluaran atau alokasi dana.

Adapun manfaat dilaksanakannya pengelolaan keuangan pendidikan adalah: (a) memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, artinya dengan dana tertentu diperoleh hasil yang maksimal atau dengan dana minimal diperoleh hasil / tujuan tertentu, (b) memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut (terutama bagi lembaga pendidikan swasta termasuk kursus-kursus), dan (c) dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran-kebocoran ataupun penyimpangan-penyimpangan akan dapat dikendalikan apabila pengelolaan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Apabila kekeliruan dan itu terjadi, maka akan berakibat buruk, baik bagi pengelola keuangan (atasan langsung dan bendaharawan) maupun bagi lembaga pendidikan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengelolaan keuangan pendidikan lebih difokuskan dalam proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan, serta mengawasi pelaksanaan penggunaan dana, baik untuk biaya operasional maupun biaya capital, disertai bukti-bukti secara administratif dan fiisik (material) sesuai dengan dana yang dikeluarkan.

D. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses pengaturan berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki satuan pendidikan, sehingga memberi kontribusi secara optimal terhadap jalannya proses pembelajaran.

Pengelolaan sarana prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi pendidik dan tenaga kependidikan maupun peserta didik untuk berada di sekolah.

Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien (Bafadal, 2003). Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan itu dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana

bappelitbangda

merupakan kegiatan yang amat penting di sekolah, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah dibutuhkan suatu proses sebagaimana terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu : mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemeliharaan dan pengawasan. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah perlu direncanakan dengan cermat berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran.

Sarana dan prasarana yang diperlukan satuan pendidikan, dapat dibedakan sebagai berikut.

1. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya.

Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

a. Sarana pembelajaran, mencakup: (a) sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misal Papan tulis, LCD, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain. (b) peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing mata pelajaran.
b. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM dan citra satelit. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

2. Prasarana Pendidikan

Prasarana pendidikan dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

a. Prasarana bangunan. Mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang aula/seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, bengkel, fasilitas umum (masjid dan lapangan olah raga) dan kesejahteraan, seperti rumah sakit, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa.
b. Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, dan taman sekolah.

E. Pengelolaan Kelas

Seorang guru memiliki fungsi sebagai pendidik, pengajar, dan juga manajer kelas. Pelaksanaan fungsi guru sebagai manajer kelas perlu didukung

bappelitbangda

dengan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan yang memadai agar proses pembelajaran dapat berlangsung seefektif dan seoptimal mungkin.

Proses pembelajaran yang efektif dan optimal tidak akan terjadi dengan sendirinya, dan tidak pula datang secara tiba-tiba. Hal tersebut tentu harus diupayakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Steer yang dikutip oleh Nan Rahminawati (2021) menyatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan "*bagaimana organisasi/individu melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai sasarannya*". Untuk itulah, maka guru sebagai individu yang melaksanakan seluruh tugas pokoknya di dalam kelas haruslah sesuai dengan apa yang telah direncakannya, sehingga tugas itu dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Apa pengelompokkan tugas guru di dalam kelas serta aspek pendukung apa yang perlu diperhatikan guru dalam memperlancar tugasnya perlu diketahui guru sedini mungkin

F. Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memegang peranan strategis dalam pelaksanaan proses pendidikan, terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan pendidik dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat.

Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan haruslah diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskannya secara efektif dan efisien. Untuk itu, para pimpinan lembaga pendidikan perlu memperhatikan bagaimana membuat sistem sekolah yang dapat menarik, sehingga terjadi proses pembelajaran yang menyenangkan, dengan senantiasa berorientasi pada pencapaian hasil yang berkualitas. Oleh karena itu, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan dapat dimaknai sebagai *keseluruhan aktivitas yang integral, berkaitan dengan masalah perencanaan, rekruitmen, pembinaan atau pengembangan penilaian dan pemberhentian dalam suatu sistem kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan dan mewujudkan fungsi sekolah yang sebenarnya.*

Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk mewujudkan kemampuan, motivasi, dan kreativitas para pendidik dan tenaga kependidikan untuk:

1. Mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahannya sendiri.

bappelitbangda

2. Secara berkesinambungan menyesuaikan program pendidikan sekolah terhadap kebutuhan kehidupan (belajar) peserta didik dan terhadap persaingan kehidupan di masyarakat secara sehat dan dinamis.
3. Menyediakan bentuk kepemimpinan (khususnya mempersiapkan kader pemimpin pendidikan yang benar-benar handal dan dapat diteladani), yang mampu mewujudkan "*human organization*" yang pengertiannya lebih dari sekedar "*human relationship*" pada setiap jenjang manajemen organisasi pendidikan nasional dan pada setiap jenjang pendidikan di sekolah itu sendiri, yaitu:
    a. Bentuk kepemimpinan yang menjamin munculnya peningkatan produktivitas pendidikan sebagai paduan fungsi efektivitas, efisiensi, dan ekuisitas (keadilan) melalui pengelolaan tenaga kependidikan yang rasional dan profesional.
    b. Bentuk kepemimpinan yang menjamin kelangsungan usaha-usaha ke arah terwujudnya keseimbangan (*equilibrium*) kehidupan organisasi melalui usaha-usaha menyerasikan tujuan-tujuan individu dengan tujuan-tujuan sistem sekolah / organisasi pendidikan.
4. Mewujudkan kondisi dan iklim kerjasama sistem sekolah / organisasi pendidikan yang mendukung secara maksimal pertumbuhan profesional dan kecakapan teknis setiap pendidik dan tenaga kependidikan.

   Selain itu, dengan terkelolanya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan, maka akan:
    a. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi
    b. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan
    c. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu
    d. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercyaan bersama
    e. Menciptakan iklim kerja yang harmonis

bappelitbangda

f. Terkait dengan pelaksanaan tugasnya, tenaga pendidik secara khusus memiliki tugas dan fungsi sebagai guru dan dosen yang didasarkan pada Undang-Undang No 14 Tahun 2007, yaitu sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa: Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

G. Pengelolaan Layanan Khusus

Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik. Hal ini sesuai dengan UU Sisdiknas Bab 11 Pasal 3 yang memuat tentang adanya tujuan pendidikan nasional. Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut maka sekolah memerlukan suatu manajemen layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta didiknya sehingga tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai.

Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan di organisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapain tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah antara lain juga berusaha agar peserta didik senanatiasa berada dalam keadaan baik. Baik disini menyangkut aspek jasmani maupun rohaninya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien.

bappelitbangda

Adapun substansi Manajemen Layanan Khusus berdasarkan proses manajemen adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, meliputi analisis kebutuhan layanan khusus bagi warga sekolah dan penyusunan program layanan khusus bagi warga sekolah
2. Pengorganisasian, berupa pembagian tugas untuk melaksanakan program layanan khusus bagi warga sekolah
3. Penggerakan, meliputi pengaturan pelaksanaan perpustakaan, koperasi sekolah, ketrampilan, unit kesehatan sekolah, ekstrakurikuler, tabungan, keagamaan, kantin, perpustakaan, kafetaria, dan layanan khusus lainnya.
4. Pengawasan, meliputi pemantauan program layanan khusus dan penilaian kinerja program layanan khusus bagi warga sekolah.

H. Pengelolaan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Hubungan sekolah dan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan peserta didik di sekolah. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Begitu juga sebaliknya, sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Sehubungan dengan hal itu, maka sekolah berkewajiban untuk memberikan penjelasan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sedangkan sekolah, harus mengetahui dengan jelas, apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah.

Adapun tujuan terselenggaranya hubungan sekolah dan masyarakat menurut E. Mulyasa adalah:

1. untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak,
2. untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan
3. untuk mengembangkan antisiasme / semangat saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak.

Upaya merealisasikan tujuan tersebut di atas dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain dengan memberitahu masyarakat mengenai program-

bappelitbangda

program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan.

Kepala sekolah yang baik merupakan salah satu kunci untuk dapat menciptakan hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat secara efektif. Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergi antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Lebih lanjut, E. Mulyasa menyatakan bahwa hubungan yang harmonis ini akan membentuk:

1. Saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja;
2. Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti, dan pentingnya peranan masing-masing;
3. Kerjasama yang erat antar sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggungjawab atas suksesnya pendidikan di sekolah.

Berbagai upaya yang perlu dilakukan antara sekolah dan masyarakat tidak terlepas dari fungsi sekolah dalam masyarakat, yakni:

1. sekolah sebagai lembaga pembaharu (*agent of change*), yang mengintroduksi perubahan pengetahuan, cara berpikir, pola hidup, kebiasaan, dan tata cara pergaulan,
2. sekolah sebagai lembaga seleksi (*selecting agency*), yang memilih / membeda-bedakan anggota masyarakat menurut kemampuan dan potensinya dan memberikan pembinaan sesuai dengan kemampuan itu, agar setiap individu / anggota masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin,
3. sekolah sebagai lembaga peningkat (*class leveling agency*), yang membantu meningkatkan taraf sosial warga negara dan dengan demikian akan menghilangkan perbedaan “kelas” dalam masyarakat,
4. sekolah sebagai lembaga asimilasi (*assimilating agency*), yang berusaha mengurangi/ menghilangkan perbedaan-perbedaan atas dasar tradisi, adat, dan kebudayaan, sehingga terdapat usaha penyesuaian diri yang lebih besar dalam persatuan dan kesatuan bangsa,
5. sekolah sebagai lembaga pemeliharaan kelestarian (*agent of preservation*), yang memelihara dan meneruskan sifat-sifat budaya yang patut dipelihara dan diteruskan.

bappelitbangda

Berdasarkan ruang lingkup manajemen pendidikan yang telah disebutkan maka apabila seluruh ruang lingkup tersebut terkelola dengan baik maka kualitas mutu pendidikan akan senantiasa meningkat dan menambah angka partisipasi sekolah. Sehingga capaian indeks HLS dan RLS dapat ikut meningkat seiring dengan kualitas pelayanan pendidikan yang meningkat.

2.2.5 Programme for International Student Assessment (PISA)

Program for International Student Assessment (PISA) adalah penilaian internasional yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains siswa berusia 15 tahun setiap 3 tahun. Pertama kali dilakukan pada tahun 2000, domain utama pembelajaran bergilir antara membaca, matematika, dan sains dalam setiap siklusnya. PISA juga mencakup ukuran kompetensi umum atau lintas kurikuler, seperti pemecahan masalah kolaboratif. Secara desain, PISA menekankan keterampilan fungsional yang telah diperoleh siswa saat mereka mendekati akhir wajib belajar. PISA dikoordinasikan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), sebuah organisasi antar pemerintah negara-negara industri, dan dilakukan di Amerika Serikat oleh NCES.

Melalui PISA Indonesia diajak untuk melihat bagaimana orang lain, negara lain melihat sistem pendidikan di Indonesia, sekaligus memberi masukan obyektif tentang perbaikan yang perlu dilakukan ke depan. Sejak tahun 2016 Kemendikbud menggiatkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai bagian dari implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Kemendikbud membentuk kelompok kerja Gerakan Literasi Nasional untuk mengoordinasikan berbagai kegiatan literasi yang dikelola unit-unit kerja terkait. Gerakan Literasi Masyarakat, misalnya, sudah lama dikembangkan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD Dikmas, Kemdikbud), sebagai tindak lanjut dari program pemberantasan buta aksara yang mendapatkan penghargaan UNESCO pada tahun 2012 (angka melek aksara sebesar 96,51%). Sejak tahun 2015 Ditjen PAUD Dikmas juga menggerakkan literasi keluarga dalam rangka pemberdayaan keluarga meningkatkan minat baca anak.

Bersamaan dengan itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah untuk meningkatkan daya baca siswa dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menggerakkan literasi bangsa dengan menerbitkan buku-buku pendukung bagi siswa yang berbasis pada kearifan lokal. Tahun 2017 ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen

bappelitbangda

GTK) menggagas Gerakan Satu Guru Satu Buku untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam pembelajaran bac0a dan tulis.

Kemendikbud membentuk tim untuk menindaklanjuti hasil penilaian PISA 2018 dengan mengintegrasikan kemampuan-kemampuan dasar yang diukur dalam PISA (membaca, matematika, dan sains) ke dalam kurikulum pendidikan Indonesia dan membuat target pencapaian skor PISA untuk tahun 2021 dan 2024 dengan langkah yang konkret untuk mencapainya. Berdasarkan hasil PISA 2018 Indonesia mengalami penurunan dibanding tahun 2015, begitu juga dengan posisi yang tidak beranjak dari 10 terendah diantara negara peserta lainnya.

Kemendikbud merespon tanggapan, dorongan dan masukan-masukan dari berbagai sumber, paling tidak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah menyiapkan beberapa strategi sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengacu pada penilaian PISA 2021.

Lima strategi yang disiapkan oleh Kemendikbud diantaranya adalah : 1). mengubah standar penilaian Ujian Nasional (UN) menjadi ‘assesment’ kompentensi minimum yang terinspirasi PISA dan soal-soalnya pun melekat dengan PISA; 2). melakukan transformasi kepemimpinan sekolah; 3). meningkatkan kualitas pendidikan profesi guru (PPG) agar dapat mencetak guru yang berkualitas, yang memiliki misi menghasilkan siswa terbaik; 4). Ke empat mentransformasikan pengajaran yang sesuai tingkat kemampuan siswa; 5). Meningkatkan upaya perubahan (transformasi) tidak hanya di internal Kemendikbud saja, tetapi juga akan dilakukan pada daerah dan berbagai organisasi penggerak seperti perusahaan yang punya ketertarikan di bidang pendidikan, start up-start up di pendidikan dan partisipasi masyarakat lainnya. Hasil PISA tidak hanya sekadar skor dan ranking. Hasil studi PISA menjabarkan perilaku anak, kondisi belajar anak, latar belakang anak, cara mengajar guru, dan seterusnya.

2.2.6 Regulasi Strategi Pemerintah dalam Peningkatan Angka Partisipasi Pendidikan Dasar dan Menengah

A. Strategi Pemerintah Pusat (Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2018)

Strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan angka partisipasi PAUD adalah:

1) Meningkatkan ketersediaan layanan PAUD dengan kualitas yang baik, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan prevalensi stunting pada balita;

bappelitbangda

2) Membangun komitmen pemerintah daerah untuk terus mengadakan lembaga PAUD yang sesuai dengan kebutuhannya, khususnya di wilayah yang belum memiliki lembaga PAUD;
3) Menyiapkan ketersediaan guru PAUD dan kapasitas LPTK sebagai lembaga penyedia guru PAUD;
4) Mempertimbangkan TK-SD Satu Atap dengan mengoptimalkan penugasan guru kelas awal SD;
5) Menyediakan subsidi PAUD bagi anak dari keluarga tidak mampu agar anak-anak tersebut terbantu kesiapan bersekolahnya melalui pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Kebijakan SPM, pendanaan dari filantropi dan subsidi silang swadaya masyarakat (*crowdfunding*); dan
6) Menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai satuan PAUD.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan peningkatan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah:

1) Memenuhi kebutuhan daya tampung untuk semua jenjang pendidikan melalui pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru yang disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana;
2) Mempertahankan kapasitas terpasang dengan rehabilitasi fasilitas yang rusak, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana;
3) Membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun; dan
    a) Melaksanakan program afirmasi bagi daerah khusus termasuk anak dengan kondisi tidak sekolah atau dengan kebutuhan khusus akan dilakukan melalui berbagai langkah diantaranya:
    b) Melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dan pelaksanaan program untuk anak putus sekolah;
    c) Membuat program/strategi untuk membantu anak-anak yang memiliki kondisi tidak sekolah atau kebutuhan khusus, termasuk afirmasi bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia di luar negeri;

bappelitbangda

d) Menyediakan layanan pendidikan untuk anak dari daerah 3T yang tidak memungkinkan pembangunan sekolah di daerahnya, misalnya melalui sekolah garis depan atau sekolah berasrama;
e) Memberikan mekanisme belajar (seperti cara penyampaian materi pelajaran dan pelaksanaan asesmen) yang disesuaikan dengan kondisi hidup anak yang khusus, seperti anak rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum; dan
f) Melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat agar dapat menemukan anak-anak yang tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan, baik jalur formal maupun nonformal.

B. Strategi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Rencana Strategis Disdik Jabar Tahun 2018-2023)

Strategi yang dapat dilakukan dalam mencapai Tata Kelola Pendidikan akuntabilitas dan transparasi dilakukan melalui beberapa strategi yaitu terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja pemerintah yang akuntabel, meningkatkan efektivitas e-budgeting dalam penyelenggaraan kegiatan, meningkatkan implementasi Open Goverment di dalam lingkungan Dinas Pendidikan. Arah Kebijakan Tata Kelola dilakukan atas strategi yang dicanangkan. Lebih lanjut dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 5 Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Barat

Visi : **" Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi danKolaborasi "**			
Misi : **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktifmelalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1.Meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi anak usia sekolah SMA/SMK (16-18 tahun), Pendidikan Menengah Khusus (16-18 tahun) serta Layanan Khusus	1.1. Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia sekolah (16-18 tahun) pada jenjang SMA/SMK/SMALB.	1.1.1. Meningkatkan layanan akses pendidikan jenjang Pendidikan SMA, SMK dan PKLK yang merata.	1.1.1.1. Membangun sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh pendidikan jenjang SMA/SMK/SLB/Layanan Khusus di daerah-daerah secara merata. 1.1.1.2 Membangun 1 Sekolah SMK/SMA satu kecamatan.

bappelitbangda

(15-21 tahun) yang merata tanpa adanya hambatan.	1.2. Rendahnya Jumlah penduduk usia 15 tahun keatassedang bekerja dengan pendidikan SMP	1.2.1. Memberikan kemudahan aksesbilitas bagi anak usia sekolah secara merata.	1.2.1.1. Memberikan bantuan layanan aksespendidikan bagi anak usia sekolah yang membutuhkan
	1.3 Meningkatnya kualitas layanan akses pendidikan anak usia sekolah pendidikan menengah	1.3.1 Menjamin dalam penyelenggaraan layanan akses pendidikan sesuai dengan SPM	1.3.1.1. Meyelenggarakan layanan akses pendidikan bagi sekolahnegeri maupun swasta harus sesuai dengan SPM
2. Meningkat kan Mutu Pendidikan melalui orientasi pembelajaran berbasis karakter Lokal	2.1 Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan Menengah	2.1.1 Menjamin dalam penyelenggaraan layanan akses pendidikan sesuai dengan SNP 2.1.2.Meningkatkan kualitas pembelajaran sesuaidengan standar yang berlaku 2.1.3 Melakukan Revitalisasi pembelajaran di SMK	2.1.1.1 Meyelenggarakan layanan akses pendidikan bagi sekolahnegeri maupun swasta harus sesuai dengan SNP 2.1.1.2 Mengimplementasikan kurikulum yang berlaku bagi seluruh sekolah SMA/SMK/SLB yang ada di wilayah Kabupaten dan Kota. 2.1.1.3. Memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap sekolah SMA yang baru mengimplementasikan kurikulum yang berlaku. 2.1.1.4 MelibatkanDU/DI dalam melakukan Revitalisasi pembelajaran di SMK

Visi : **" Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi danKolaborasi "**			
Misi : **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktifmelalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**

bappelitbangda

	2.2. Meningkatnya Profesionalisme Guru	2.2.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas mutu Guru/Pengawas/Kepala Sekolah secara merata	2.2.1.1 Memberikan sosialisasi serta bimtek bagi Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah tentang penilaian kinerja dalam upaya meningkatkan profesionalisme. 2.2.1.2 Memberikan bantuan finansial agar Guru Honorer maupun ASN memenuhi Sertifikasi Guru. 2.1.2.3 Memberikan pelatihan seputar *Subject Knowledge* dan *Pedagogical Knowledge*
	2.3 Meningkatnya perilaku Baik siswa yang berlandaskan pada pendidikan karater lokal	2.3.1 Menanamkan pendidikan karakater lokal Jabar Masagi	2.3.1.1 Memasukan unsur pendidikan karakter Jabar Masagi dalam setiap pembelajaran.
3 Meningkatkan Tata kelola Pendidikan yang Transparansi dan Akuntabel	3.1Meningkatnya kinerja Dinas Pendidikan yang akuntabel	3.1.1Terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja pemerintah yang akuntabel	3.1.1.1Penyempurnaan sistem manajemen dalam pelaporan kinerja pemerintah
	3.2Dipertahankanya Opini laporan keuangan yang wajartanpa pengecualian	3.2.1Meningkatkan efektivitas e-budgeting dalam penyelenggaraan kegiatan	3.2.1.1. Mengarahkan kepada instansi di lingkungan Dinas Pendidikan menerapkane-budgeting sebagai upaya E-Goverment.
	Meningkatnya partisipasi publikdalam tata kelola pendidikan	Meningkatkan implementasi Open Goverment di dalam lingkungan Dinas Pendidikan	3.2.1.2. Menerapkan Open Goverment dalam lingkungan Dinas Pendidikan

Sumber : Renstra Disdik Provinsi Jawa Barat 2019-2023

bappelitbangda

C. Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Rencana Strategi Disdik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023)

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat telah melakukan SWOT analisis terhadap kondisi kependidikan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh beberapa strategi dan arah kebijakan diantaranya sebagai berikut

1) Meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah untuk mengikuti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya.
2) Mengoptimalkan seluruh sumber daya dan teknologi informasi.
3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan penyesuaian kebutuhan anggaran.
4) Peningkatan pemahaman aparatur terkait penguasaan teknologi.
5) Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur daerah dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
6) Penerapan pelayanan pendidikan yang transparan, cepat, tepat dan akurat.
7) Melakukan koordinasi lintas perangkat daerah yang terkait.
8) Melaksanakan sosialisasi kepada ASN terkait pentingnya pendidikan dengan bekerjasama dengan perangkat daerah terkait.
9) Meningkatkan aksesibilitas, sumber daya, dan pembiayaan pelaksanaan pendidikan kesetaraan.

Adapun arah kebijakan yang difokuskan dinas pendidikan adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan kualitas aparatur
2) Peningkatan kualitas Guru/Pendidik
3) Pengawasan penerapan kurikulum
4) Penguatan kelembagaan penyelenggaraan Paket A/B/C
5) Memastikan ketersediaan tenaga pengajar
6) Perbaikan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
7) Penguatan manajemen pendidikan
8) Penyediaan dan perbaikan fasilitas penunjang pendidikan

bappelitbangda

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bandung Barat



2022

BAB 3

GAMBARAN UMUM KAB. BANDUNG BARAT

Kajian Penyusunan Strategi Daerah
Untuk Meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bandung Barat

BAB - 3
GAMBARAN UMUM KAB. BANDUNG BARAT

3.1 Kondisi Fisik dan Kependudukan

Kabupaten Bandung Barat adalah wilayah pemekaran Kabupaten Bandung, yang pembentukannya diwacanakannya sejak tahun 1999. Walaupun demikian baru pada tanggal 2 Januari 2007 secara formal dan legal menjadi Kabupaten Bandung Barat dengan terbitnya UU No.12/2007. Undang-undang ini menetapkan bahwa Kabupaten Bandung Barat mencakup wilayah 15 (lima belas) kecamatan yaitu Kecamatan Lembang, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cipeundeuy, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Rongga, Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Gununghalu. Pada Tahun 2011, terdapat penambahan 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Saguling hasil pemekaran dari Kecamatan Batujajar. Secara geografis batas wilayah administrasi Kabupaten Bandung Barat adalah:

- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.
- sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
- sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
- sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur

Berdasarkan Permendagri No. 97 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 14 Tahun 2017 tentang tentang Batas Daerah Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 18 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 75 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat dan Permendagri No. 76 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat. Luas wilayah Kabupaten Bandung Barat mengalami perubahan dari semula 1.305,774 Km2 atau 130.577,4 Ha menjadi 1.284,67 Km2 atau 128.467 Ha. Perubahan luas tersebut terbagi di dalam beberapa wilayah kecamatan seperti pada tabel di bawah ini:

bappelitbangda

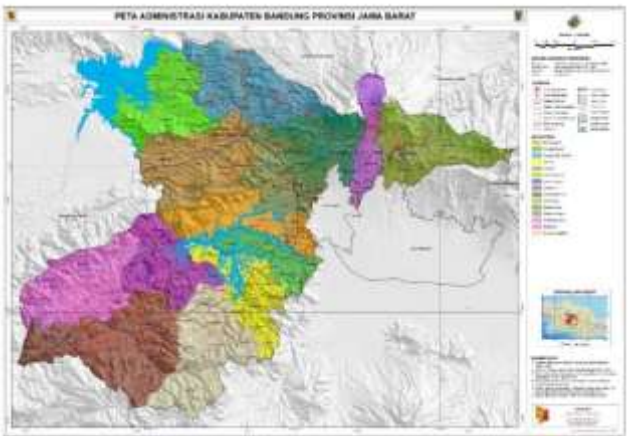
Tabel 3. 1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Bandung Barat Sebelum dan Setelah Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat

Sebelum Perubahan	
Kecamatan	**Luas Wilayah (Km²)**
Batujajar	32,04
Cihampelas	46,99
Cikalongwetan	112,93
Cililin	77,79
Cipatat	126,05
Cipeundeuy	101,09
Cipongkor	79,96
Cisarua	55,11
Gununghalu	160,64
Lembang	95,56
Ngamprah	36,01
Padalarang	51,4
Parongpong	45,15
Rongga	113,12
Saguling	51,46
Sindangkerta	120,47
Kab. Bandung Barat	**1305,77**

Sesudah Perubahan	
Kecamatan	**Luas Wilayah (Km²)**
Batujajar	31,06
Cihampelas	46,95
Cikalongwetan	110,72
Cililin	77,68
Cipatat	125,68
Cipeundeuy	101,96
Cipongkor	79,96
Cisarua	55,54
Gununghalu	155,08
Lembang	98,11
Ngamprah	35,58
Padalarang	51,54
Parongpong	44,96
Rongga	112,34
Saguling	51,47
Sindangkerta	106,07
Kab. Bandung Barat	**1284,7**

Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kedudukan Kabupaten Bandung Barat pada lingkup nasional berada pada kawasan andalan yakni, kawasan andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan adalah industri, tanaman pangan, pariwisata, dan perkebunan. Selain itu, Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung yang berpusat di Kota Bandung dan merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang dikembangkan di Kota Padalarang, Lembang, dan Cililin.



Gambar 3. 1 Peta Admiistrasi Kabupaten Bandung Barat

bappelitbangda

Kabupaten Bandung Barat dalam lingkup Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang termasuk ke dalam PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan pusat Kota Bandung, serta kawasan perkotaan di dalam wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi, yang berbatasan dengan Kota Bandung.

Secara astronomis Kabupaten Bandung Barat terletak diantara 107° 1,10' BT sampai dengan 107° 4,40' BT dan 06° 3,73' LS sampai dengan 07o1,031' LS dan secara topografi Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal yaitu dapat mencapai lebih dari 40%. Wilayah yang sangat terjal ini terdapat pada wilayah Kecamatan Gununghalu seluas 13.480 ha. Kemiringan lereng datar yaitu 0-8% terdapat pada Kecamatan Batujajar. Sisanya berada pada kemiringan 8-15%. Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat berkisar sekitar 0 – 2 .500 mdpl. Dengan luasan lahan terbesar pada ketinggian 500 – 1.000 mdpl yaitu 66,57% dari total luasan wilayahnya. Berdasarkan informasi kemiringan dan ketinggian wilayah terdapat empat jenis morfologi di Kabupaten Bandung Barat, yaitu: pedataran, landai, perbukitan dan pegunungan.

Tabel 3. 2 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bandung Barat tahun 2021

Kecamatan *Subdistrict*	Persentase Penduduk *Percentage of Total Population*		Kepadatan Penduduk (per km²)[5] *Population Density per sq.km*	
	2020[1]	2021[2]	2020[1]	2021[2]
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rongga	3,39	3,39	536,3	543,7
Gununghalu	4,43	4,42	492,9	498,8
Sindangkerta	4,11	4,11	609,8	619,3
Cililin	5,34	5,34	1 227,3	1245,6
Cihampelas	7,42	7,48	2 823,1	2888,5
Cipongkor	5,59	5,61	1 250,5	1272,4
Batujajar	6,03	6,06	3 365,6	3429,4
Saguling	1,89	1,90	657,2	669,7
Cipatat	7,85	7,84	1 113,1	1128,3
Padalarang	10,14	10,13	3 528,4	3573,9
Ngamprah	9,94	9,91	4 934,5	4992,6
Parongpong	6,32	6,30	2 502,9	2533,2
Lembang	11,05	11,01	2 068,2	2090,4
Cisarua	4,43	4,43	1 436,3	1457,0
Cikalong Wetan	7,16	7,16	1 134,4	1150,4
Cipeundeuy	4,92	4,92	870,6	882,6
Bandung Barat	**100**	**100,00**	**1 369,6**	**1 389,4**

Sumber : Kabupaten Bandung Barat dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, tahun 2021 kepadatan penduduk di Kabupaten Bandung Barat, yaitu 1.389.4 jiwa/km2 . Kecamatan Ngamprah memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 4.992,6 jiwa/km2 di Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan Kecamatan Gununghalu memiliki kepadatan penduduk terendah, yaitu 498,8 jiwa/km2.

3.2 Kondisi Pendidikan

3.2.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah atau APS merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 % dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 %, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah. Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal seperti Paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTS dan Paket C setara SMA/MA.

Tabel 3. 3 Perkembangan APS Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

Indikator	SD	SMP
Angak Partisipasi Kasar (APK)	102,99	91,38
Angka Partisipasi Murni (APM)	96,69	76,56
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	99,66	94,29

Sumber : Indikator Makro Sosial, Bappelitbangda, diolah oleh BPS KBB, 2021

3.2.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (Gross Enrollment Ratio) atau APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal yakni Paket A, Paket B, dan Paket C turut diperhitungkan.

bappelitbangda

Tabel 3. 4 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2021

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan					
	Angka Partisipasi Murni (APM)			Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
SD/MI	97,60	97,87	97,69	103,84	104,53	102,99
SMP/MTs	78,26	77,46	76,56	94,11	90,99	91,38
SMA/SMK/MA	49,55	50,07	49,70	62,61	67,00	65,42

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat

Pada tahun 2021 APK Kabupaten Bandung Barat pada jenjang SD/MI/Paket A sebesar 102,99 persen angka ini menurun 2,46 persen dari kondisi tahun 2020, kenaikan pun terjadi pada APK jenjang SMP/MTS/Paket B yang naik 1,27 persen pada tahun 2021. Sedangkan pada jenjang SMA/MA/Paket C dan Perguruan Tinggi menurun sebesar 2,42 persen. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah angka partisipasi.

3.2.1.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (Net Enrollment Ratio) atau APM adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Tabel 3. 5 Perkembangan APM Menurut Jenjang Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2021

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan					
	Angka Partisipasi Murni (APM)			Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
SD/MI	97,60	97,87	97,69	103,84	104,53	102,99
SMP/MTs	78,26	77,46	76,56	94,11	90,99	91,38
SMA/SMK/MA	49,55	50,07	49,70	62,61	67,00	65,42

Sumber : BPS Kab. Bandung Barat

Pada tahun 2021 APM Kabupaten Bandung Barat pada jenjang SD/MI/Paket A sebesar 97,69 persen angka ini menurun 0,18 persen dari kondisi tahun 2020, sedangkan pada jenjang SMP/MTS/Paket B menurun 1,10 persen dari tahun 2020. Sedangkan pada jenjang SMA/MA/Paket C dan Perguruan Tinggi meningkat sebesar 2,33 persen dan 2,52 persen. Meskipun terus meningkat secara konsisten namun nilai capaian terutama pada pendidikan menengah dan tinggi masih relatif rendah.

4. Harapan Lama Sekolah

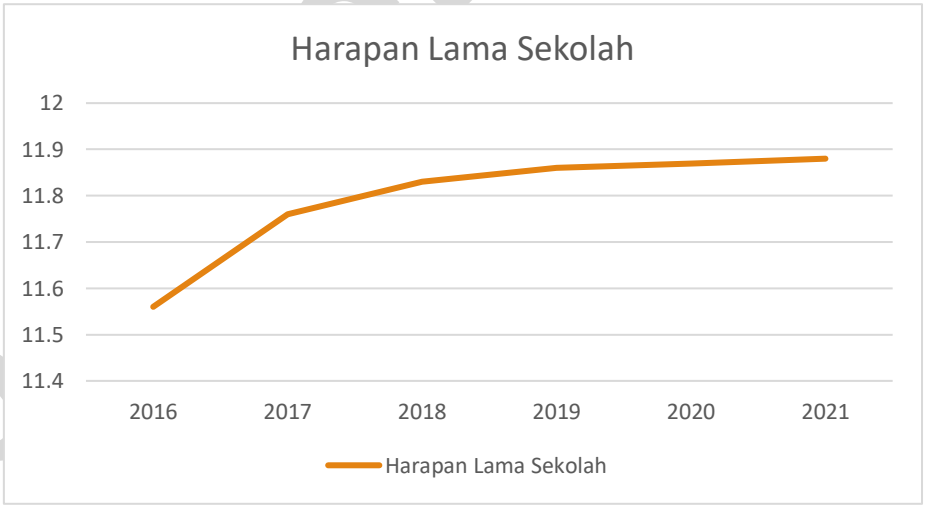
Angka Harapan Lama Sekolah atau expected years school (EYS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Tabel 3. 6 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021

Kode	Wilayah Jawa Barat	Harapan Lama Sekolah					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0000	Nasional	12.72	12.85	12.91	12.95	12.98	13.08
3200	Provinsi Jawa Barat	12.30	12.42	12.45	12.48	12.50	12.61
3217	Bandung Barat	11.56	11.79	11.83	11.86	11.87	11.88

Sumber: Dapodik 2022

HLS Kabupaten Bandung Barat masih berada di bawah nilai capaian HLS Provinsi Jawa Barat, meskipun demikian tren meningkat terus ditunjukan pada lima tahun terakhir. Kabupaten Bandung berhasil meningkatkan 0,32 tahun dari 11,56 tahun menjadi 11,88 tahun pada tahun 2021 atau mencapai jenjang pendidikan menengah tingkat 3.



Gambar 3. 2 Grafik Capaian Indeks HLS Kabupaten Bandung Barat 2016-2021

3.3 Rata-Rata Lama Sekolah

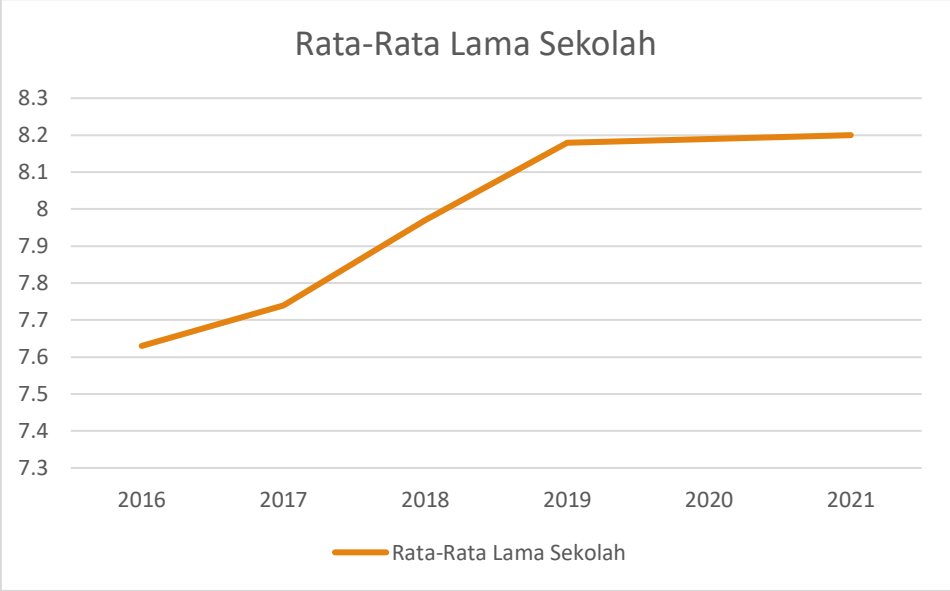
Angka rata-rata lama sekolah atau mean years school (MYS) adalah Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Tabel 3. 7 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021

Kode	Kab/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0000	NASIONAL	7,95	8,10	8,17	8,34	8,48	8,54
3200	JAWA BARAT	7,95	8,14	8,15	8,37	8,55	8,61
3217	Bandung Barat	7,63	7,74	7,97	8,18	8,19	8,2

Sumber: Dapodik 2022

RLS Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 sebesar 8,20 tahun atau secara rata-rata sudah lama sekolah penduduk mencapai jenjang SMP kelas 2, angka ini meningkat 0,57 tahun dari 7,63 tahun pada 2016. Secara posisi masih berada di bawah nilai capaian RLS Provinsi Jawa Barat, namun menunjukan peningkatan secara presisten dalam lima tahun terakhir.



Gambar 3. 3 Grafik Capaian Indeks RLS Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2021

3.4 Angka Putus Sekolah dan Angka Lulusan

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Sementara angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Angka putus sekolah dan angka kelulusan di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

bappelitbangda

Tabel 3. 8 Perkembangan Angka Putus Sekolah dan Agka Kelulusan Tahun 2021

JUMLAH LULUSAN, SISWA, MENGULANG, PUTUS SEKOLAH, SISWA TINGKAT VI SEKOLAH DASAR
KABUPATEN BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2020/2021

NEGERI

No.	Kecamatan	Lulusan 2020/2021	Siswa 2019/ 2020	Mengulang 2020/2021	Putus Sekolah 2020/2021	Siswa Tingkat VI 2019/ 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Batujajar	1.485	9.130	-	-	1.485
02	Cihampelas	1.932	11.679	-	-	1.932
03	Cikalongwetan	1.974	12.408	1	-	1.974
04	Cililin	1.116	7.205	-	-	1.116
05	Cipatat	2.171	13.637	-	3	2.171
06	Cipeundeuy	1.312	8.183	-	-	1.312
07	Cipongkor	1.301	7.760	-	1	1.301
08	Cisarua	1.282	7.791	-	-	1.282
09	Gununghalu	947	5.449	-	1	947
10	Lembang	2.902	17.390	2	1	2.902
11	Ngamprah	2.185	13.249	-	2	2.185
12	Padalarang	2.362	14.532	2	-	2.362
13	Parongpong	1.235	7.711	-	-	1.235
14	Rongga	851	5.008	-	-	851
15	Saguling	449	2.774	-	-	449
16	Sindangkerta	1.024	6.331	-	1	1.024
Jumlah		24.528	150.237	5	9	24.528

Sumber : Profil dan Statistika Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung barat 2021

JUMLAH LULUSAN, SISWA, MENGULANG, PUTUS SEKOLAH, SISWA TINGKAT VI SEKOLAH DASAR
KABUPATEN BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2020/2021

SWASTA

No.	Kecamatan	Lulusan 2020/2021	Siswa 2019/ 2020	Mengulang 2020/2021	Putus Sekolah 2020/2021	Siswa Tingkat VI 2019/ 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Batujajar	`	550	-	2	`
02	Cihampelas	107	541	-	-	107
03	CikalongWetan	8	77	-	-	8
04	Cililin	78	519	-	-	78
05	Cipatat	-	-	-	-	
06	Cipeundeuy	-	-	-	-	
07	Cipongkor	-	115	-	-	-
08	Cisarua	-	-	-	-	
09	Gununghalu	-	-	-	-	
10	Lembang	249	1.761	-	-	249
11	Ngamprah	379	2.391	-	-	379
12	Padalarang	207	1.266	-	-	207
13	Parongpong	345	2.053	-	-	345
14	Rongga	-	-	-	-	
15	Saguling	-	-	-	-	
16	Sindangkerta	24	106	-	-	24
Jumlah		1397	9.379	0	2	1397

Sumber : Profil dan Statistika Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat 2021

3.5 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah

Indikator lain yang juga relevan menggambarkan kondisi pelayanan bidang pendidikan adalah rasio guru dan murid. Perbandingan jumlah murid dan guru sekolah pada berbagai jenjang di Kabupaten Bandung Barat berada pada kisaran 21-24 murid/guru. Rasio paling baik ada pada tingkatan SD dengan 21 murid/guru. Secara keseluruhan, hanya beberapa kecamatan di tingkat SD yang mempunyai rasio murid/guru yang baik.

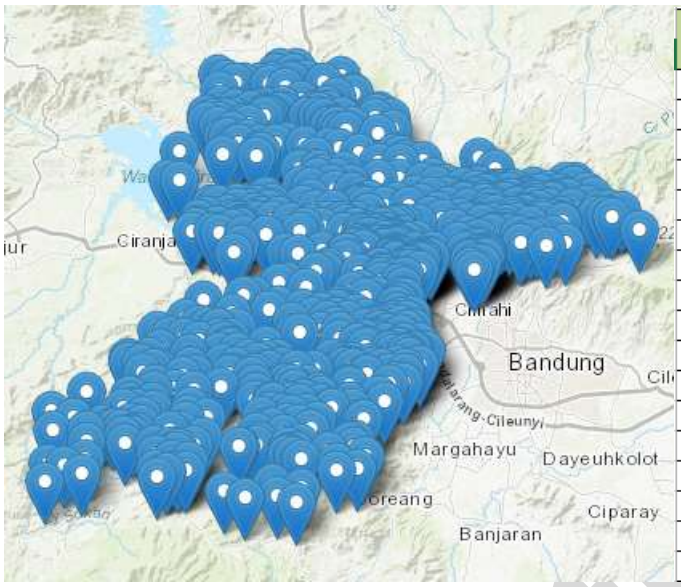
Tabel 3. 9 Jumlah Murid, Guru, dan Rasio Murid – Guru di Kabupaten Bandung Barat 2020

No	Kecamatan	SD			SMP			SMA			SMK		
		Jumlah Murid	Jml Guru	Rasio Murid - Guru	Jml Murid	Jml Guru	Rasio Murid - Guru	Jml Murid	Jml Guru	Rasio Murid - Guru	Jml Murid	Jml Guru	Rasio Murid - Guru
1	Rongga	5.008	295	17	1.802	92	20	463	31	15	659	42	16
2	Gununghalu	5.449	321	17	3.165	164	19	761	29	26	1.402	87	16
3	Sindangkerta	6.437	328	20	2.434	134	18	1.854	76	24	368	24	15
4	Cililin	7.724	370	21	4.425	205	22	3.059	123	25	1.196	51	23
5	Cihampelas	12.220	490	25	5.028	210	24	1.250	56	22	3.174	152	21
6	Cipongkor	7.875	406	19	2.562	140	18	852	42	20	1.618	97	17
7	Batujajar	9.680	399	24	3.955	160	25	1.609	94	17	3.395	154	22
8	Saguling	2.774	150	18	799	49	16	384	24	16	336	27	12
9	Cipatat	13.637	582	23	3.734	185	20	1.328	44	30	2.758	130	21
10	Padalarang	15.798	745	21	8.060	372	22	2.841	174	16	4.753	201	24
11	Ngamprah	15.640	653	24	5.181	319	16	1.721	75	23	2.384	105	23
12	Parongpong	9.764	468	21	4.015	227	18	1.487	82	18	1.166	66	18
13	Lembang	19.151	790	24	7.650	442	17	3.593	240	15	5.435	224	24
14	Cisarua	7.791	311	25	2.266	121	19	1.612	93	17	1.307	39	34
15	Cikalong Wtn	12.485	529	24	3.884	163	24	1.416	82	17	1.392	81	17
16	Cipendeuy	8.183	391	21	3.366	143	24	1.230	54	23	1.751	86	20
Kabupaten Bandung Barat		159.616	7228	22	62.326	3.126	20	25.460	1.319	19	33.094	1.566	21

Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

3.6 Sebaran Sekolah Dasar

Kabupaten Bandung Barat memiliki cukup banyak sarana sekolah dasar yang tersebar di semua kecamatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari data pokok pendidikan sekolah dasar terbanyak terdapat di kecamatan lembang yang memiliki 66 sekolah dasar sementara kecamatan yang paling sedikit jumlah sekolah dasar yakni kecamatan saguling yang memiliki 15 kecamatan.



No	Wilayah	SD		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	Kec. Lembang	58	8	**66**
2	Kec. Padalarang	57	8	**65**
3	Kec. Ngamprah	40	9	**49**
4	Kec. Cipatat	57	0	**57**
5	Kec. Cikalongwetan	56	1	**57**
6	Kec. Cipongkor	43	2	**45**
7	Kec. Cililin	38	3	**41**
8	Kec. Cihampelas	39	2	**41**
9	Kec. Gununghalu	35	0	**35**
10	Kec. Sindangkerta	39	2	**41**
11	Kec. Parongpong	27	12	**39**
12	Kec. Batujajar	29	3	**32**
13	Kec. Cipeundeuy	40	0	**40**
14	Kec. Rongga	34	0	**34**
15	Kec. Cisarua	28	0	**28**
16	Kec. Saguling	15	0	**15**
	Total	**635**	**50**	**685**

Sumber : Data Pokok Pendidikan 2022

Gambar 3. 4 Peta Sebaran Sekolah Dasar (SD)

3.7 Sebaran Sekolah Menengah Pertama

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bandung Barat tidak sebanding dengan jumlah sekolah dasar. Total jumlah sekolah dasar di kabupaten bandung barat mencapai 685 sekolah sementara jumlah Sekolah menengah pertama hanya mencapai 187 sekolah. Kecamatan lembang memiliki jumlah SMP sebanyak 23 sekolah baik negeri maupun swasta. Sementara kecamatan yang paling sedikit jumlah SMP terdapat di kecamatan saguling yang hanya memiliki 4 sekolah baik negeri maupun swasta.

bappelitbangda



No	Wilayah	SMP		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	Kec. Lembang	6	17	**23**
2	Kec. Padalarang	5	15	**20**
3	Kec. Ngamprah	4	11	**15**
4	Kec. Cipatat	5	5	**10**
5	Kec. Cikalongwetan	4	11	**15**
6	Kec. Cipongkor	5	5	**10**
7	Kec. Cililin	4	9	**13**
8	Kec. Cihampelas	3	9	**12**
9	Kec. Gununghalu	5	7	**12**
10	Kec. Sindangkerta	4	5	**9**
11	Kec. Parongpong	3	13	**16**
12	Kec. Batujajar	3	3	**6**
13	Kec. Cipeundeuy	5	3	**8**
14	Kec. Rongga	4	5	**9**
15	Kec. Cisarua	4	1	**5**
16	Kec. Saguling	3	1	**4**
Total		**67**	**120**	**187**

Sumber: Data Pokok Pendidikan 2022

Gambar 3. 5 Peta Sebaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)

3.8 Jumlah Peserta Didik

Peserta didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan, karena tanpa adanya peserta didik tidak akan mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Peserta didik merupakan komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar. Didalam proses belajarmengajar, peserta didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Kabupaten Bandung Barat memiliki jumlah peserta didik yang cukup banyak.

Jumlah peserta didik sekolah dasar mencapai 157.074 jiwa, sementara jumlah peserta didik SMP yang terdata dalam dapodik sebanyak 61.198 jiwa. Dan jumlah peserta didik jenjang SMA dan SMK mencapai 60.284 jiwa.dan kecamatan lembang menjadi kecamatan dengan jumlah perserta didik terbanyak dengan total lebih dari 33.000 jiwa. Sementara jumlah kecamatan yang memiliki jumlah peserta didik paling sedikit terdapat di kecamatan saguling.

bappelitbangda

Tabel 3. 10 Jumlah Peserta Didik di Kabupaten Bandung Barat Tahun Ajaran 2020/2022

No	Wilayah	SD			SMP			SMA			SMK		
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kec. Lembang	18,350	9,440	8,910	7,477	3,846	3,631	4,010	1,860	2,150	4,947	2,716	2,231
2	Kec. Padalarang	15,321	7,900	7,421	7,910	4,073	3,837	3,533	1,408	2,125	4,477	2,607	1,87
3	Kec. Ngamprah	15,833	8,259	7,574	5,563	2,869	2,694	2,023	871	1,152	2,319	1,403	916
4	Kec. Cihampelas	12,218	6,392	5,826	5,107	2,541	2,566	1,174	458	716	3,091	1,708	1,383
5	Kec. Cipatat	13,334	6,901	6,433	3,613	1,850	1,763	1,493	666	827	2,363	1,363	1000
6	Kec. Cikalongwetan	12,224	6,313	5,911	3,737	1,934	1,803	1,598	671	927	1,115	753	362
7	Kec. Batujajar	9,650	5,076	4,574	3,902	1,940	1,962	1,837	762	1,075	3,026	1,61	1,416
8	Kec. Cililin	7,455	3,864	3,591	4,027	2,041	1,986	3,724	1,733	1,991	1,054	593	461
9	Kec. Parongpong	9,570	4,975	4,595	4,032	2,200	1,832	1,784	873	911	1,236	569	667
10	Kec. Cipeundeuy	7,991	4,122	3,869	3,272	1,650	1,622	1,589	791	798	1,673	1,005	668
11	Kec. Cipongkor	7,961	4,127	3,834	2,118	1,089	1,029	846	405	441	1,809	1,076	733
12	Kec. Cisarua	7,580	3,926	3,654	2,272	1,121	1,151	1,560	742	818	1,105	631	474
13	Kec. Sindangkerta	6,292	3,224	3,068	2,352	1,130	1,222	1,888	941	947	585	361	224
14	Kec. Gununghalu	5,426	2,792	2,634	2,996	1,560	1,436	809	400	409	1,568	811	757
15	Kec. Rongga	4,958	2,665	2,293	1,957	959	998	726	351	375	526	340	186
16	Kec. Saguling	2,911	1,517	1,394	863	443	420	492	255	237	225	144	81
Total		**157,074**	**81,493**	**75,581**	**61,198**	**31,246**	**29,952**	**29,086**	**13,187**	**15,899**	**31,119**	**17,69**	**13,429**

Sumber: Data Pokok Pendidikan 2022

3.9 Jumlah Rombongan Belajar

Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. Rombongan Belajar sering disebut dengan Rombel, identik dengan banyaknya kelas dalam suatu sekolah. Keberadaan jumlah rombongan belajar dalam suatu satuan pendidikan menjadi sangat penting untuk menetapak jumlah jam mengajar yang harus dipenuhi oleh guru.

Jumlah rombongan belajar tiap sekolah berbeda-beda, disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang terdaftar dalam sekolah tersebut. Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut.

- SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 28 peserta didik
- SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 32 peserta didik
- SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik
- SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik
- SDLB dalam satu kelas paling banyak 5 peserta didik
- SMPLB dan SMALB dalam satu kelas paling banyak 8 peserta didik

bappelitbang

Berikut jumlah rombel yang terdapat dibeberapa kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 3. 11 Jumlah Rombongan Belajar di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

No	Wilayah	Total	TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1	Kec. Lembang	1,459	73	35	0	143	14	0	626	244	121	163	40
2	Kec. Padalarang	1,212	75	54	0	53	4	0	516	240	107	149	14
3	Kec. Ngamprah	1,116	89	45	0	56	4	0	550	180	64	94	34
4	Kec. Cipatat	1,003	41	113	0	30	2	0	488	117	47	92	73
5	Kec. Cihampelas	843	48	14	0	82	10	0	383	154	34	106	12
6	Kec. Cikalongwetan	815	9	26	0	108	4	0	430	120	50	56	12
7	Kec. Cililin	722	15	67	0	54	4	0	290	126	115	37	14
8	Kec. Batujajar	705	46	18	0	45	7	0	299	116	56	106	12
9	Kec. Parongpong	684	64	12	0	16	4	0	338	130	59	41	20
10	Kec. Cipongkor	628	12	61	2	81	4	0	295	75	28	64	6
11	Kec. Cipeundeuy	618	11	85	0	6	7	0	290	104	48	55	12
12	Kec. Gununghalu	548	8	84	4	28	4	0	235	105	24	56	0
13	Kec. Sindangkerta	542	20	53	0	31	7	0	260	88	59	24	0
14	Kec. Cisarua	484	19	16	0	30	11	0	239	70	49	38	12
15	Kec. Rongga	404	4	17	0	55	5	0	211	73	21	18	0
16	Kec. Saguling	230	5	13	0	49	5	0	107	26	15	10	0
Total		**12,013**	**539**	**713**	**6**	**867**	**96**	**0**	**5,557**	**1,968**	**897**	**1,109**	**261**

Sumber: Data Pokok Pendidikan 2022

3.10 Jumlah Guru

Definisi guru adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya tersebut. Dalam hal ini, guru tidak hanya mengajarkan pendidikan formal, tapi juga pedidikan lainnya dan bisa menjadi sosok yang diteladani oleh para muridnya.

Adapun peran guru adalah sebagai berikut;

- Sebagai pengajar, yaitu orang yang mengajarkan suatu ilmu pengetahuan kepada para anak didiknya.
- Sebagai pendidik, yaitu orang yang mendidikan muridnya agar memiliki tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
- Sebagai pembimbing, yaitu orang yang mengarahkan muridnya agar tetap berada pada jalur yang tepat sesuai tujuan pendidikan.
- Sebagai motivator, yaitu orang yang memberikan motivasi dan semangat kepada muridnya dalam belajar.
- Sebagai teladan, yaitu orang yang memberikan contoh dan teladan yang baik kepada murid-muridnya.
- Sebagai administrator, orang yang mencatat perkembangan para muridnya.

bappelitbangda

- Sebagai evaluator, orang yang melakukan evaluasi terhadap proses belajar anak didiknya.
- Sebagai inspirator, orang yang menginspirasi para muridnya sehingga memiliki suatu tujuan di masa depan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari dari dapodik tahun 2022 jumlah guru di Kabupaten Bandung Barat sudah cukup banyak, pemetaan jumlah tersebut dapat terlihat melalui gambar berikut.

Tabel 3. 12 Jumlah Guru di Kabupaten Bandung Barat tahun 2022

No	Wilayah	SD			SMP			SMA			SMK		
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kec. Lembang	677	189	488	400	165	235	210	89	121	222	78	144
2	Kec. Padalarang	640	160	480	370	120	250	161	62	99	209	100	109
3	Kec. Ngamprah	628	153	475	305	113	192	110	38	72	112	53	59
4	Kec. Cihampelas	433	118	315	227	91	136	66	36	30	170	79	91
5	Kec. Cipatat	507	160	347	158	60	98	53	21	32	119	59	60
6	Kec. Parongpong	436	149	287	214	82	132	90	48	42	69	29	40
7	Kec. Cililin	334	111	223	209	89	120	142	71	71	56	25	31
8	Kec. Cikalongwetan	470	169	301	165	62	103	76	38	38	67	33	34
9	Kec. Batujajar	334	84	250	163	52	111	87	36	51	150	60	90
10	Kec. Cipongkor	357	141	216	124	64	60	47	33	14	99	52	47
11	Kec. Cipeundeuy	325	124	201	132	57	75	56	27	29	87	48	39
12	Kec. Gununghalu	276	117	159	171	77	94	33	15	18	85	43	42
13	Kec. Sindangkerta	298	99	199	135	72	63	78	37	41	31	14	17
14	Kec. Cisarua	261	86	175	108	32	76	84	29	55	56	27	29
15	Kec. Rongga	255	114	141	88	43	45	32	19	13	40	27	13
16	Kec. Saguling	139	58	81	45	22	23	25	13	12	28	17	11
Total		**6,370**	**2,032**	**4,338**	**3,014**	**1,201**	**1,813**	**1,350**	**612**	**738**	**1,600**	**744**	**856**

Sumber: Data Pokok Pendidikan 2022

3.11 Kondisi Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*). Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan nasional, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 mencapai Rp.526 triliun yang terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya.

Pemerintah terus mendorong percepatan penurunan kemiskinan yang ditargetkan menjadi 0% di tahun 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),

bappelitbangda

tingkat kemiskinan Indonesia saat ini mencapai 4%, setara 10.86 juta jiwa. Pada Maret 2021, persentase penduduk miskin sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta orang.

Kabupaten Bandung Barat memiliki memiliki tingkat miskin sebesar 2,91 persen dengan besaran jumlah Penduduk Miskin Ekstrem 49,85 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem di Bandung Barat tersebut merupakan bagian dari penduduk miskin sebesar 10,49 persen atau 179,46 ribu jiwa. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem di provinsi Jawa Barat sebesar 2,57 persen atau sebesar 1278,71 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem di Jawa Barat tersebut merupakan bagian dari penduduk miskin sebesar 7,88 persen atau 3920,23 ribu jiwa.

Tabel 3. 13 Kemiskinan dan Ketimpangan 2020

Keterangan	Bandung Barat	Jawa Barat	Indonesia
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (persen)	2,91	2,57	3,85
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribu jiwa)	49,85	1278,71	10448,13
Tingkat Kemiskinan (persen)	10,49	7,88	9,78
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	179,46	3920,23	26424,02

Sumber: Susenas Maret 2020, BPS (diolah)

Di Kabupaten Bandung Barat terdapat 16 Kecamatan, 165 Desa, artinya ditiap daerah terdapat warga miskin dan miskin ekstrem sebesar

Tabel 3. 14 Warga Miskin di Kabupaten Bandung Barat 2020

Wilayah	Warga miskin	Warga Ekstrem
RW	77	21
Desa	1087	302
Kecamatan	11.216	3115

Sumber: Susenas Maret 2020, BPS (diolah)

Rata-rata Lama Sekolah penduduk miskin ekstrem di Bandung Barat selama 8,92 tahun, sementara di Jawa Barat secara keseluruhan selama 6,57 tahun.Terdapat dua indikator utama yang perlu mendapat perhatian lebih mengingat perbedaan capaian yang sangat besar dibandingkan dengan capaian nasional, yaitu Angka Putus Sekolah usia 16-18 Tahun, hal ini tidak segera ditangani dengan serius. Di Bandung Barat, Angka Putus Sekolah usia 16-18 Tahun mencapai 50,66 persen, sementara di Jawa Barat secara keseluruhan sebesar 48,84 persen. Tingginya indikator kepala rumah tangga

bappelitbangda

yang tidak bersekolah serta rendahnya tingkat kelulusan kepala keluarga hampir di setiap jenjang pendidikan menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan rumah tangga. Di Bandung Barat, terdapat 38,92 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem hanya lulusan SD dan 4,02 persen tidak bersekolah.

bappelitbangda

bappelitbangda

bappelitbangda

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bandung Barat



2022

BAB 4

METODE KAJIAN

Kajian Penyusunan Strategi Daerah
Untuk Meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bandung Barat

BAB - 4
METODE KAJIAN

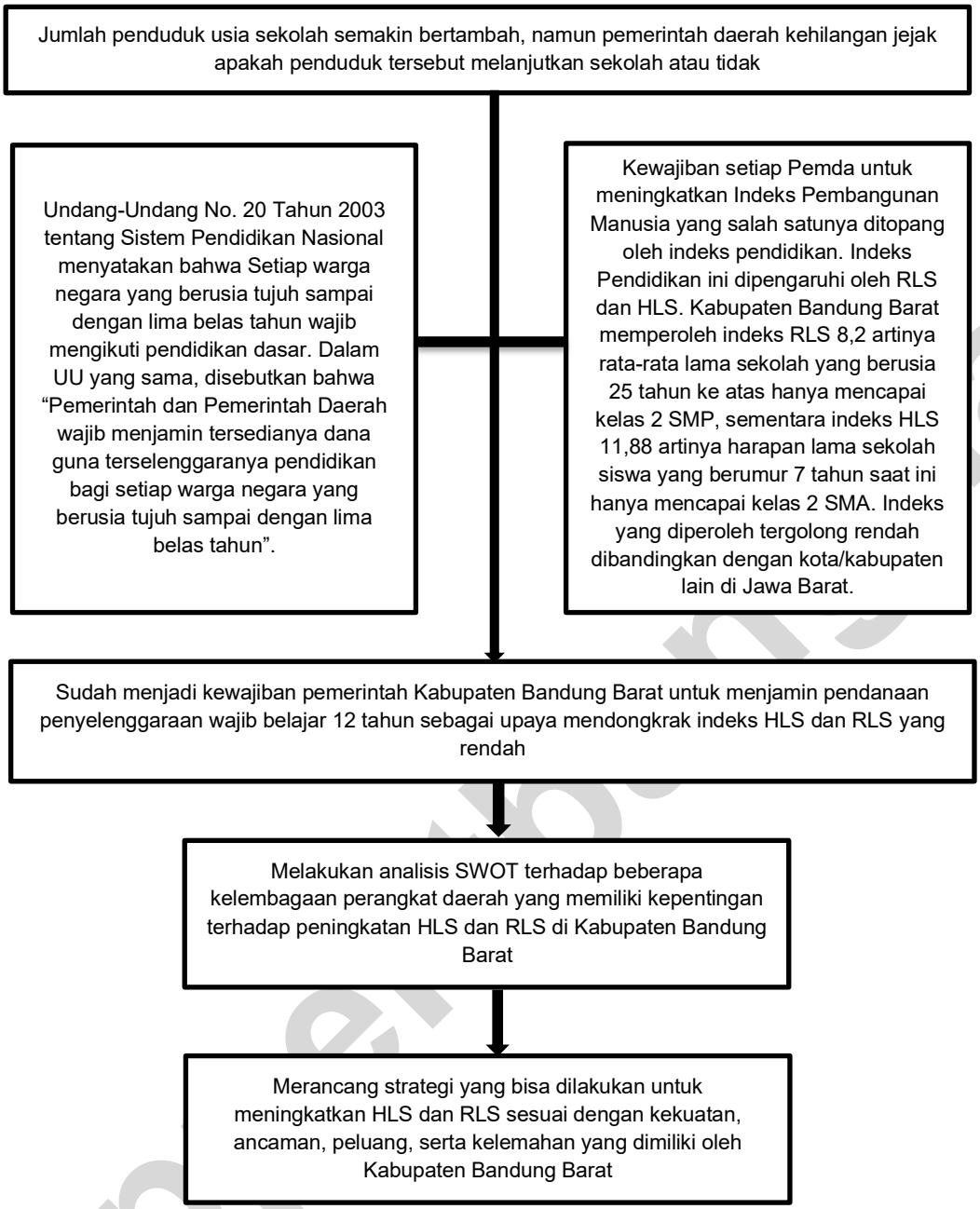
4.1 Kerangka Pemikiran

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk terutama jumlah usia sekolah setiap tahunnya maka kebutuhan layanan pendidikan akan bertambah pula. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Dalam UU yang sama, disebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Bandung Barat wajib untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa yang berusia 7 hingga 15 tahun untuk mengikuti jenjang pendidikan sebagaimana mestinya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator kemajuan suatu daerah. Salah satu unsur pendukung indeks IPM adalah indeks pendidikan yang ditentukan oleh Hasil Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kabupaten Bandung Barat memperoleh indeks RLS 8,2 artinya rata-rata lama sekolah warga yang berusia 25 tahun ke atas hanya mencapai kelas 2 SMP, sementara indeks HLS 11,88 artinya harapan lama sekolah siswa yang berumur 7 tahun saat ini hanya mencapai kelas 2 SMA. Untuk meningkatkan nilai indeks tersebut, Kabupaten Bandung Barat harus berusaha untuk membuat anak-anak melanjutkan dan menuntaskan sekolahnya.

Berdasarkan alasan tersebut maka dibutuhkan beragam strategi untuk meningkatkan nilai indeks HLS dan RLS, strategi-strategi tersebut diperoleh dari analisis kasus yang diolah menggunakan SWOT analisis sehingga strategi yang dibuat sesuai dengan kemampuan dan kondisi lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Untuk lebih jelasnya, bagan kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

bappelitbangda



Gambar 4. 1 Kerangka Pemikiran

4.2 Metode Pengumpulan Data

Adapun kebutuhan data, metode pengumpulan data dan sumber data untuk pekerjaan Kajian Penyusunan Strategi Daerah Untuk Meningkatkan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bandung Barat disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 4. 1 Kebutuhan Data Primer Kegiatan

No.	Kebutuhan Data	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data
Analisis strategi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah di kabupaten Bandung Barat.			
1.	Proses Perencanaan Strategis	FGD, Formulir Isian, Studi Literatur	Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah, Kepala Sekolah SD & SMP Kabupaten Bandung Barat
2.	Mandat organisasi	FGD, Formulir Isian, Studi Literatur	Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah, Kepala Sekolah SD & SMP Kabupaten Bandung Barat
3.	Misi dan nilai – nilai organisasi	FGD, Formulir Isian, Studi Literatur	Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah, Kepala Sekolah SD & SMP Kabupaten Bandung Barat
4.	Isu-isu strategis yang dihadapi organisasi	FGD, Formulir Isian, Studi Literatur	Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah, Kepala Sekolah SD & SMP Kabupaten Bandung Barat
5.	Strategi untuk mengelola isu – isu	FGD, Formulir Isian, Studi Literatur	Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah, Kepala Sekolah SD & SMP Kabupaten Bandung Barat
Analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis Strength, Weakness, Opportunity dan Treath (SWOT).			
1.	Menilai lingkungan internal yaitu kelebihan dan kekurangan	FGD, Formulir Isian, Studi Literatur	Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah, Kepala Sekolah SD & SMP Kabupaten Bandung Barat
2.	Menilai lingkungan eksternal yaitu Peluang yang dimiliki dan tantangan yang akan dihadapi	FGD, Formulir Isian, Studi Literatur	Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah, Kepala Sekolah SD & SMP Kabupaten Bandung Barat

Tabel 4.2 Kebutuhan Data Sekunder Kegiatan

No.	Kebutuhan Data	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data
Analisis strategi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah di kabupaten Bandung Barat.			
1.	Proses Perencanaan Strategis	Studi Literatur	Renstra Kemendikbud, Renstra Disdik Provinsi, Renstra Disdik Kabupatan Bandung Barat
2.	Mandat organisasi	Studi Literatur	RJPMD 2018-2023 Kabupaten Bandung Barat, LKPJ 2021
3.	Misi dan nilai – nilai organisasi	Studi Literatur	RJPMD 2018-2023, Renstra Disdik Kabupaten Bandung Barat

bappelitbangda

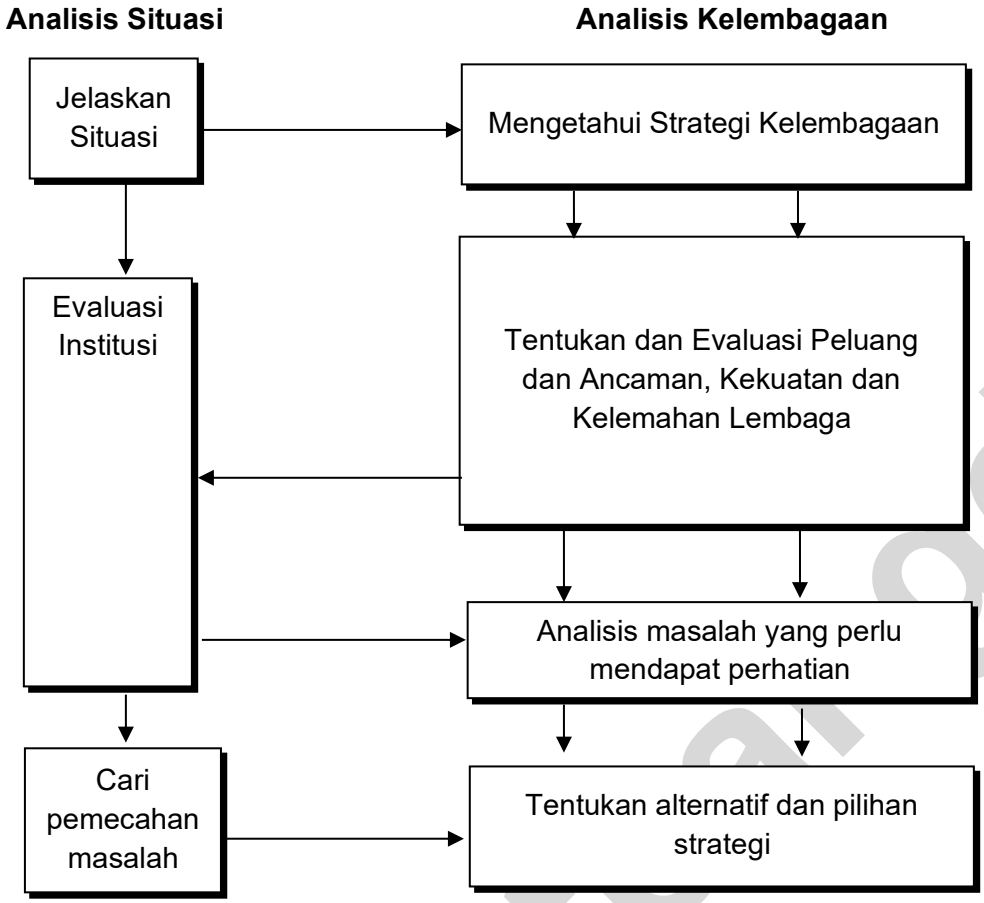
No.	Kebutuhan Data	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data
4.	Isu-isu strategis yang dihadapi organisasi	Studi Literatur	Statistika dan Profil Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2021, RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023
5.	Strategi untuk mengelola isu – isu	Studi Literatur	RJPMD 2018-2023, Renstra Disdik Kabupaten Bandung Barat
Analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis Strength, Weakness, Opportunity dan Treath (SWOT).			
1.	Menilai lingkungan internal yaitu kelebihan dan kekurangan	Studi Literatur	RPJMD 2018-2023, Statistika dan Profil Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2021
2.	Menilai lingkungan eksternal yaitu Peluang yang dimiliki dan tantangan yang akan dihadapi	Studi Literatur	RPJMD 2018-2023

4.3 Metode Analisis

Metode pada kajian penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan *analysis case*. Menyusun data kualitatif berarti menggolongkan ke dalam pola, tema, unit atau kategori. Apabila data yang diperoleh berasal dari banyak sumber, maka data yang diperoleh diseleksi dan dibanding-bandingkan agar dapat dimasukkan ke dalam salah satu unit atau kategori. Tafsiran atau interpretasi menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti dalam menyusun dan menjelaskan unit atau kategori, mencari hubungan di antara berbagai konsep dan memberikan makna kepada analisis unit atau kategori tersebut.

Kegiatan yang paling penting dalam proses analisis data adalah memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, menganalisis situasi untuk mengetahui isu apa yang sedang terjadi, dan memutuskan tindakan apa yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah. Pada kajian penyusunan strategi untuk meningkatkan HLS dan RLS di Kabupaten Bandung Barat menggunakan analisis kasus dengan pola analisis seperti gambar berikut.

bappelitbangda



Tabel 4. 2 Diagram Proses Analisis Kasus

Lebih lanjut, Freddy Rangkuti (2006:15-16) menyatakan bahwa sabelum menganalisis kasus perlu terlebih dahulu mengetahui kerangka analisis kasus secara keseluruhan sebagai berikut.

Tahap 1 : Memahami situasi dan informasi yang ada.

Tahap 2 : Memahami permasalahan yang terjadi, baik masalah yang bersifat umum maupun spesifik.

Tahap 3 : Menciptakan berbagai alternatif dan memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah

Tahap 4 : Evaluasi pilihan alternatif dan pilih alternatif yang Terbaik.

Caranya dengan membahas sisi pro maupun Kontra dan memberikan bobot skor untuk masing-masing Alternatif dan sebutkan kemungkinan yang akan terjadi.

Berikut petunjuk untuk memahami masalah yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang berkaitan dengan pendidikan.

Mengetahui tujuan analisis:

bappelitbangda

- Ke arah mana pendidikan ingin dibawa ?
- Faktor-faktor kunci apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut ?
- Kapan tujuan tersebut harus dicapai?

Deskripsi mengenai bisnis

- Bagaimana keahlian manajemen yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat?
- Bagaimana kondisi persaingan yang ada ?
- Siapa lembaga yang paling berpengaruh ?

Deskripsi Organisasi / institusi

- Bagaimana struktur organisasi yang dimiliki ?
- Bagaimana mengenai perencanaan, pengendalian, dan sistem yang dimiliki ?
- Bagaimana mengenai keahlian sumber daya manusia ?
- Bagaimana dengan gaya manajemen ?

Evaluasi secara keseluruhan

- Bagaimana peluang yang ada ?
- Bagaimana dengan kekuatan yang dimiliki ?
- Bagaimana dengan masalah yang dihadapi ?
- Bagaimana kelemahan yang ada ?

Alternatif kunci

- Bagaimana caranya menggunakan seluruh kekuatan untuk merebut peluang dan mengatasi ancaman ?
- Bagaimana mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman ?
- Bagaimana prioritas ditentukan ?

Memilih alternatif

- Alternatif apa yang terbaik ?
- Alternatif apa yang dapat memperbaiki situasi ?
- Alternatif apa yang dapat meningkatkan kegiatan operasional?
- Perubahan apa yang bersifat kritis?
- Sumber daya apa yang bersifat kritis ?

Dengan menjawab semua pertanyaan di atas, maka analis dapat memahami situasi kelembagaan di Kabupaten Bandung Barat yang akan dianalisis secara menyeluruh, terutama kondisi lingkungan eksternal serta kekuatan dan kelemahan yang dihadapinya. Selain itu, misi, strategi, dan tujuan serta semua permasalahan yang dihadapi juga dievaluasi. Kadang-kadang masalah yang dihadapi dalam membuat analisis adalah strategi telah berubah, manajemen sangat lemah, struktur organisasi

bappelitbangda

telah berubah. Dalam analisis kasus yang bersifat strategis, tidak ada jawaban yang bersifat benar atau salah. Ini disebabkan karena setiap kasus yang berhasil diselesaikan diikuti oleh pendekatan baru dan pencarian masalah baru yang muncul dari permasalahan sebelumnya.

Tahap akhir analisis adalah memformulasikan keputusan yang akan diambil. Keputusannya didasarkan atas justifikasi yang dibuat secara kualitatif maupun kuantitatif, terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dengan menggunakan model tertentu.

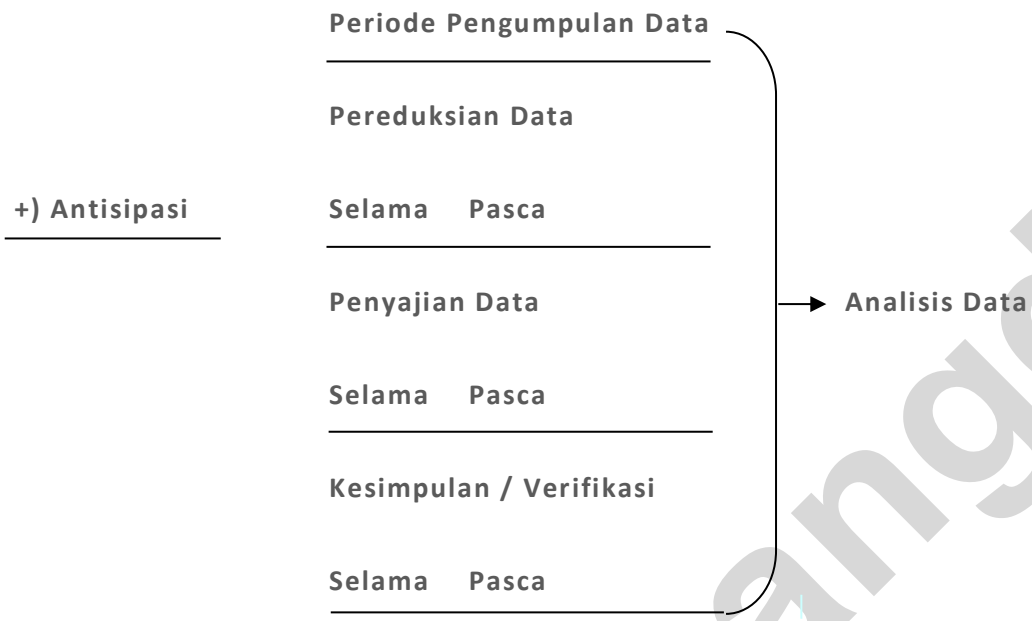
Analisis data yang telah diperoleh dari hasil FGD dan Studi Literatur kemudian diolah melalui langkah-langkah berikut.

- Data yang telah dikumpulkan, dicari dan ditetapkan "*issue*"nya, peristiwa atau kegiatan yang berulang-ulang terjadi untuk dijadikan unit analisis. Subino Hadisubroto (1988:15) menjelaskan bahwa dalam proses "*unitisasi*" ini dilakukan adalah mengkodingkan data sehingga data mentah dapat ditransformasikan secara sistematis menjadi unit-unit yang dapat dikelompokan menurut karakteristiknya yang terkait. Pekerjaan yang perlu dilakukan dalam "*unitisasi*" ini adalah: membuat batas setiap unit, memilah unit berdasarkan batas tersebut, dan mengidentifikasi masing-masing unit untuk keperluan analisis berikutnya. Proses "*unitisasi*" tersebut dilakukan bukan saja setelah data terkumpul, akan tetapi dilakukan pula selama proses pengumpulan data.
- Mengumpulkan dan memilah-milah data yang memberikan banyak contoh-contoh yang dijadikan unit analisis untuk mengetahui berbagai ragam dimensi unit itu yang merupakan kategori-kategori. Dalam hal ini, Subino Hadisubroto (1988:15) menjelaskan pula bahwa pada dasarnya proses kategorisasi ini tidak lain daripada memilah sejumlah unit menjadi satu kategori tertentu berdasarkan karakteristiknya yang "mirip"
- Menguraikan (secara tertulis) kategori-kategori itu memahami semua aspek yang terdapat didalamnya sambil terus mencari hal-hal baru. Dalam menguraikan setiap kategori tersebut, peneliti harus menjelaskan hubungan satu sama lain sehingga tidak kehilangan konteksnya.
- Memberikan tafsiran yang menggambarkan perspektif peneliti untuk memberikan makna terhadap analisis unit dan kategori dan hubungannya antara unit dan kategori itu.

Apabila memperhatikan proses analisis data di atas, tampak bahwa data kualitatif itu merupakan kegiatan yang berkesinambungan yang dilakukan pada saat data itu dikumpulkan. Analisis data seperti itu memungkinkan peneliti untuk berpikir ulang

bappelitbangda

tentang data yang ada dengan strategi pengumpulan data berikutnya. Apabila dilukiskan dalam model alur maka unsur-unsur analisis data tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



(Subino Hadisubroto, 1988:19)

Gambar 4. 2 Unsur-Unsur Analisis Data Dalam Model Alur

Antisipasi reduksi data terjadi pada saat peneliti menetapkan paradigma mana, pertanyaan-pertanyaan penelitian mana, dan pendekatan-pendekatan pengumpulan data mana yang akan dipergunakan.

Salah satu teknik yang digunakan dalam analisis data pada kajian ini adalah analisis SWOT, yang didasarkan pada penentuan perpaduan antara faktor internal dan eksternal. SWOT adalah singkatan dari lingkungan *Internal Strengths* dan *Weaknesses* serta lingkungan *Eksternal Opportunities* dan *Threats* yang dihadapi. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*threats*) dengan faktor internal Kekuatan (*strengths*) dan Kelemahan (*weaknesses*).

Hasil dari analisis swot yang telah dilakukan, akan melahirkan dua keadaan yang menggambarkan strategi yang yang harus dilakukan. Kondisi pertama adalah perluasan, strategi perluasan terjadi apabila kekuatan lebih besar daripada kelemahan dan peluang lebih besar daripada ancaman. Dan strategi konsolidasi terjadi apabila kekuatan lebih kecil daripada kelemahan, dan peluang lebih kecil daripada ancaman, untuk lebih jelasnya dapat melihat gambar berikut.

bappelitbangda

S > W **O > T**	**Perluasan**
S < W **O < T**	**Konsolidasi**

Gambar 4. 3 Pembagian Hasil Swot Analisis

Kondisi perluasan dapat terjadi pada strategi SO dimana pada strategi ini dapet menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Seementara kondisi konsolidasi dapat terjadi pada Staretgi WO, strategi ST, dan Strategi WT. dimana pada kondisi ini ada kelamahan dan dan ancaman yang harus diminimalkan dan dihilangkan. Untuk lebih jelasnya dapat melihat gambar 4.4 berikut.

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan** ***[S]***	**Kelemahan** ***[W]***
Peluang ***[O]***	**Strategi SO** --- **Gunakan "S" untuk memanfaatkan "O"** Perluasan	**Strategi WO** --- **Menghilangkan "W" dan memanfaatkan "O"**
Ancaman ***[T]***	Konsolidasi **Strategi ST** --- **Gunakan "S" untuk Menghindarkan "T"**	**Strategi WT** --- **Minimalkan "W" untuk Menghindarkan "T"**

Gambar 4. 4 Analisis Swot

- Kuadran 1 : Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Institusi (Pemerintahan) tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat **memanfaatkan peluang yang ada**. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan atau perluasan.
- Kuadran 2 : Meskipun menghadapi berbagai ancaman, institusi (Pemerintahan) ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan

adalah **menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang** jangka panjang dengan cara strategi konsolidasi

- Kuadran 3 : Institusi (Pemerintahan) menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi institusi adalah **meminimalkan masalah-masalah internal** perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.
- Kuadran 4 : Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, institusi (Pemerintahan) dapat menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

bappelitbangda

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bandung Barat



2022

BAB 5

ANALISIS HASIL KAJIAN

Kajian Penyusunan Strategi Daerah
Untuk Meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bandung Barat

BAB - 5

ANALISIS HASIL

5.1 Analisis

5.1.1 Analisis Kekuatan (*Strength*)

Berdasarkan hasil FGD dan studi literatur yang telah dilakukan terhadap beberapa perangkat daerah yang memiliki kepentingan dalam pendidikan seperti Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Perwakilan Sekolah, dan Sekretariat Daerah di Kabupaten Bandung Barat, diperoleh data kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah dalam meningkatkan RLS dan HLS. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut.

Tabel 5. 1 Hasil Analisis Kekuatan Kabupaten Bandung Barat

No	Kekuatan (*Strengths*)	Responden
S1	Adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD pada misi 1 untuk mendukung dalam meningkatkan angka HLS dan RLS	**Perwakilan Bappelitbangda**
S2	KBB memiliki PKBM yang cukup banyak jumlahnya	**Perwakilan Bappelitbangda**
S3	SDM Guru dan tenaga kependidikan yg cukup banyak	**Perwakilan Bappelitbangda**
S4	Tertuang dalam misi pertama Kabupaten Bandung Barat 2018-2023 : Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas	**RENSTRA Dinas Pendidikan**
S5	Pemerintah telah mengalokasikan dana BOS (Belanja Operasional Sekolah), (Bantuan Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin), maupun pemberian beasiswa lainnya	**RENSTRA Dinas Pendidikan**
S6	Banyaknya institusi yang ada diwilayah KBB sehingga bisa dimanfaatkan dari CSR untuk mendukung program pendidikan	**Perwakilan Kesra SETDA**
S7	Banyaknya sekolah swasta di KBB	**Perwakilan Bappelitbangda**

bappelitbangda

5.1.2 Analisis Kelemahan (*Weakness*)

Selain Kekuatan, kelemahan merupakan unsur yang harus dicari untuk mengetahui kondisi internal di Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan HLS dan RLS. Berdasarkan hasil FGD dan studi literatur terhadap beberapa kelembagaan di Kabupatan Bandung Barat. Maka diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 5. 2 Hasil Analisis Kelemahan Kabupaten Bandung Barat

No	Kelemahan (*Weakness*)	Penjelasan
W1	Kurangnya kesesuaian anggaran dalam mendukung peningkatan angka HLS dan RLS	**Perwakilan Bappelitbangda**
W2	ketidak akuratan data usia wajib belajar dari sumber terkait	**Perwakilan Bappelitbangda**
W3	Kesesuaian angka putus sekolah tak sesuai dengan program kejar paket yang dianjurkan	**Perwakilan Bappelitbangda**
W4	Perizinan mendirikan PKBM terhambat	**Perwakilan Kesra SETDA**
W5	Tidak ada regulasi mengenai anggaran yang mensupport PKBM	**Perwakilan SD**
W6	Sekolah dan SDM yang tidak tersebar merata khususnya sekolah negeri (SD dan SMP)	**Perwakilan SD**
W7	Masih tingginya persentase tingkat penduduk miskin di KBB. Ketidakmampuan keluarga menyekolahkan anak ke sekolah swasta akibat tidak diterima di sekolah negeri.	**Perwakilan SD**
W8	Ketergantungan (dependency ratio) masih tinggi, masih besarnya jumlah anggota keluarga/ yang mempengaruhi peluang anak untuk dapat meneruskan pendidikannya seperti mendukung anak untuk bekerja membantu orang tua bekerja daripada sekolah	**Perwakilan SD**
W9	Aturan pembatasan usia masuk SMPN	**Perwakilan SMP**
W10	Khusus siswa ABK beberapa sekolah tidak mampu menerima karena keterbatasan guru pendamping	**Perwakilan SMP**
W11	Infrastruktur sekolah/ketersediaan sekolah tidak memadai dibandingkan daya tampung siswa SD yang besar	**Bagian Analis kebijakan**

bappelitbangda

No	Kelemahan (*Weakness*)	Penjelasan
	sedangkan jumlah sekolah SMP N kecil. Pernyataaan ini berdasarkan basis dapodik daya tampung SD vs SMP	
W12	Belum merata kualitas pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	**RENSTRA DINAS PENDIDIKAN**
W13	Belum merata kualifikasi tenaga pendidik di seluruh jenjang pendidikan.	**RENSTRA DINAS PENDIDIKAN**
W14	Minim inovasi bidang pendidikan dalam proses pembelajaran	**RENSTRA DINAS PENDIDIKAN**
W15	Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki perangkat daerah dalam hal menunjang pelaksanaan pendidikan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.	**RENSTRA DINAS PENDIDIKAN**
W16	Tidak meratanya lokasi tempat tinggal penduduk khususnya di wilayah yang memiliki aksesibilitas terbatas menyebabkan biaya tinggi untuk transportasi anak untuk sampai ke sekolah	**RPJMD**
W17	Secara geografis KBB berbatasan langsung dengan Kota Cimahi dan Kota Bandung	**Perwakilan Bappelitbangda**
W18	Masih banyak orang tua belum bisa baca tulis, tidak ada support kepada anak ketika anak kesuitan dalam pembelajaran.	**Perwakilan SD**

5.1.3 Analisis Peluang (*Opportunities*)

Disamping kondisi internal, dalam menyusun sebuah strategi juga diperlukan kondisi eksternal di Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan indeks HLS dan RLS. Kedua kondisi tersebut perlu diketahui agar strategi yang disusun dapat meningkatkan kemampuan dan menguatkan kelemahan yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat. Kondisi eksternal tersebut salah satunya adalah peluang. Berdasarkan hasil FGD dan studi literatur yang telah dilakukan diperolah data peluang Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan indeks HLS dan RLS sebagai berikut.

Tabel 5. 3 Hasil Analisis Peluang Kabupaten Bandung Barat

No	Peluang (*Opportunities*)	Penjelasan
O1	Adanya dana dari pusat yang bisa mendukung pemerintah daerah	**Perwakilan Bappelitbangda**

bappelitbangda

No	Peluang (*Opportunities*)	Penjelasan
O2	Banyaknya program-program yang berkaitan dengan pendidikan dari pusat ataupun Pemprov Jabar untuk mendukung pemerintah daerah khusus nya bidang pendidikan seperti beasiswa, BOS dll	**Perwakilan Bappelitbangda**
O3	Bidang pendidikan menjadi prioritas utama dalam pengembangan program-program pembangunan baik pada skala nasional maupun regional di tingkat kabupaten, sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran bahwa upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan menjadi kunci keberhasilan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa	**RENSTRA DINAS PENDIDIKAN**
O4	Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perkembangan sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat	**RENSTRA DINAS PENDIDIKAN**
O5	Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan, sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan akan pendidikan di kalangan masyarakat	**RENSTRA DINAS PENDIDIKAN**
O6	Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang positif bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan pada berbagai jalur dan jenjang Pendidikan	**RENSTRA DINAS PENDIDIKAN**
O7	Kegiatan pengelolaan pendidikan tingkat Kabupaten Bandung Barat kerap kali dikawal dengan lahirnya regulasi pengelolaan pendidikan baik yang diproduksi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bahkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Sebagai contoh, lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Permendiknas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sertifikasi Guru, dan Dosen menjadi bahan pertimbangan kebijakan dalam meningkatkan	**RENSTRA DINAS PENDIDIKAN**

bappelitbangda

No	Peluang (*Opportunities*)	Penjelasan
	profesionalisme Guru dan Dosen di Kabupaten Bandung Barat	
O8	Urgensi penunjang peningkatan mutu satuan pendidikan secara fisik maupun non fisik	**RENSTRA DINAS PENDIDIKAN**

5.1.4 Analisis Ancaman (*Threats*)

Selain peluang, kondisi eksternal lain yang harus diketahui dalam menyusun sebuah strategi adalah ancaman. Berdasarkan hasil FGD dan studi literatur terhadap beberapa perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat. Diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 5. 4 Hasil Analisis Ancaman Kabupaten Bandung Barat

No	Ancaman (*Threats*)	Penjelasan
T1	Dampak pandemik covid 19 yang masih ada sehingga fokus pemerintah daerah masih mengutamakan pemulihan ekonomi sehingga anggaran yang diperuntukan untuk mendukung peningkatan indeks HLS dan RLS belum maksimal	**Perwakilan Bappelitbangda**
T2	Masih ada Budaya memperkerjakan anak di lahan pertanian di wilyah tertentu	**Perwakilan Bappelitbangda**
T3	Faktor afirmasi, zonasi pada proses PPDB menghambat anak untuk sekolah akibat zonasi sehingga mempengaruhi angka putus sekolah	**Perwakilan SD**
T4	Ketidak mampuan memanfaatkan teknologi di era global dalam proses pembelajaran	**Perwakilan SD**
T5	Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendidikan di daerah tertentu	**Perwakilan SD**
T6	Banyak sekolah di Cimahi dan kota Bandung yang menjadi tujuan sekolah warga KBB	**Perwakilan SD**
T7	Adanya Aturan Kegiatan Sekolah dilakukan di waktu pagi	**Perwakilan SMP**

bappelitbangda

bappelitbangda

5.2 Hasil

Analisis Matrik IFAS dan EFAS
Alternatif strategi

Tabel 5. 5 Matriks IFAS (Internal Strategic Factor Analysis Summary)

KODE	Kekuatan (Strengths)	Bobot	Rating	Skor
S1	Adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD pada misi 1 untuk mendukung dalam meningkatkan angka HLS dan RLS	0,17	4	**0,69**
S2	KBB memiliki PKBM yang cukup banyak jumlahnya	0,10	3	**0,31**
S3	SDM Guru dan tenaga kependidikan yang cukup banyak	0,10	3	**0,31**
S4	Tertuang dalam misi pertama Kabupaten Bandung Barat 2018-2023 : Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas	0,17	4	**0,69**
S5	Pemerintah telah mengalokasikan dana BOS (belanja operasional Sekolah). (Bantuan anak usia sekolah keluarga miskin), maupun pemberian beasiswa lainnya.	0,17	4	**0,69**
S6	Banyaknya institusi yang ada di wilayah KBB sehingga bisa dimanfaatkan dari CSR untuk mendukung program pendidikan	0,14	4	**0,55**
S7	Banyaknya sekolah swasta di KBB	0,114	4	**0,55**
		1,00	**Jumlah**	**3,79**

bappelitbangda

KODE	Kelemahan (Weakness)	Bobot	Rating	Skor
W1	Kurangnya Kesesuaian anggaran dalam mendukung peningkatan angka HLS dan RLS	0,04	-3	-0,11
W2	Ketidakakuratan Data usia wajib belajar	0,06	-4	-0,25
W3	Program kejar paket pemda tidak tepat sasaran	0,06	-4	-0,25
W4	Perizinan mendirikan PKBM terhambat	0,06	-4	-0,25
W5	Tidak ada regulasi mengenai anggaran yang mensupport PKBM	0,06	-4	-0,25
W6	Sekolah dan Guru yang tidak tersebar merata khususnya sekolah negeri (SD dan SMP)	0,06	-4	-0,25
W7	Masih tingginya persentase tingkat penduduk miskin di KBB. Ketidakmampuan keluarga menyekolahkan anak ke sekolah swasta akibat tidak diterima di sekolah negeri.	0,06	-4	-0,25
W8	Ketergantungan (dependency ratio) masih tinggi, masih besarnya jumlah anggota keluarga/ yang mempengaruhi peluang anak untuk dapat meneruskan pendidikannya seperti mendukung anak untuk bekerja membantu orang tua bekerja daripada sekolah	0,06	-4	-0,25
W9	Adanya Aturan dalam Permendikbud No.1 Tahun 2021 tentang batasan usia Masuk Sekolah	0,06	-4	-0,25
W10	Khusus siswa ABK beberapa sekolah tidak mampu menerima karena keterbatasan guru pendamping	0,04	-4	-0,15
W11	Infrastruktur sekolah/ketersediaan sekolah tidak memadai dibandingkan daya tampung siswa SD yang besar sedangkan jumlah sekolah SMPN kecil. Pernyataan ini berdasarkan basis dapodik daya tampung SD vs SMP	0,04	-3	-0,11
W12	Belum merata kualitas pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	0,06	-3	-0,19
W13	Belum merata kualifikasi tenaga pendidik di seluruh jenjang pendidikan.	0,06	-3	-0,19
W14	Minim Inovasi bidang pendidikan dalam proses pembelajaran	0,04	-3	-0,11
W15	Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan pendidikan hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat	0,06	-4	-0,25

bapplitbangda

KODE	Kelemahan (Weakness)	Bobot	Rating	Skor
W16	Tidak meratanya lokasi tempat tinggal penduduk khususnya di wilayah yang memiliki aksesibilitas terbatas menyebabkan biaya tinggi untuk transportasi anak untuk sampai ke sekolah	0,06	-4	-0,25
W17	Secara geografis KBB berbatasan langsung dengan kota Cimahi dan kota Bandung	0,0625	-4	-0,25
W18	Masih banyak orang tua belum bisa baca tulis tidak ada support kepada anak ketika anak kesulitan dalam pembelajaran	0,0375	-3	-0,1125
		1,00	**Jumlah**	**-3,73**

Nilai X	**0,07**

Tabel 5. 6 MATRIKS EFAS (Eksternal Strategic Factor Analysis Summary)

KODE	Opportunity (Peluang)	Bobot	Rating	Skor
O1	Adanya dana dari pusat yang bisa mendukung pemerintah daerah	0,06	2	0,12
O2	Banyaknya program-program yang berkaitan dengan pendidikan dari pusat ataupun pemrov jabar untuk mendukung pemerintah daerah khusus nya bidang pendidikan seperti beasiswa, BOS dll	0,09	3	0,27
O3	Bidang pendidikan menjadi prioritas utama dalam pengembangan program-program pembangunan baik pada skala nasional maupun regional di tingkat kabupaten, sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran bahwa upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan menjadi kunci keberhasilan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa	0,15	4	0,61
O4	Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perkembangan sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat	0,12	4	0,48

bappeda bangda

KODE	Opportunity (Peluang)	Bobot	Rating	Skor
O5	Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang positif bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan dan pelaksaaan pendidikan pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan	0,12	3	0,36
O6	Kegiatan pengelolaan pendidikan tingkat Kabupaten Bandung Barat kerap kali dikawal dengan lahirnya regulasi pengelolaan pendidikan baik yang diproduksi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bahkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Sebagai contoh, lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Permendiknas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sertifikasi Guru, dan Dosen menjadi bahan pertimbangan kebijakan dalam meningkatkan profesionalisme Guru dan Dosen di Kabupaten Bandung Barat	0,15	4	0,61
O7	Urgensi penunjang peningkatan mutu satuan pendidikan secara fisik dan non fisik.	0,15	4	0,61
O8	Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan, sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan akan pendidikan dikalangan masyarakat	0,15	4	0,61
		1,00	**Jumlah**	**3,67**

KODE	Ancaman (Threats)	Bobot	Rating	Skor
T1	Dampak pandemic covid 19 yang masih ada sehingga fokus pemerintah daerah masih mengutamakan pemulihan ekonomi sehingga anggaran yang diperuntukan untuk mendukung peningkatan indeks HLS dan RLS belum maksimal	0,18	-4	-0,71
T2	Masih ada Budaya memperkerjakan anak di lahan pertanian di wilayah tertentu	0,11	-2	-0,21
T3	Faktor afirmasi, zonasi pada proses PPDB menghambat anak untuk sekolah akibat zonasi sehingga mempengaruhi angka putus sekolah	0,18	-4	-0,71
T4	ketidakmampuan memanfaatkan pengaruh teknologi dalam proses pembelajaran	0,18	-4	-0,71
T5	Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendidikan di daerah tertentu	0,18	-4	-0,71
T6	Banyak nya sekolah di Cimahi dan Kota Bandung yang menjadi tujuan sekolah warga KBB	0,18	-4	-0,71
KODE	**Ancaman (Threats)**	**Bobot**	**Rating**	**Skor**

bappeldabangda

T7	Adanya Aturan Kegiatan Sekolah dilakukan secara pagi	0,18	-4	-0,71
		1,00	**Jumlah**	**-4,50**

Nilai Y	**-0,83**

Penentuan Bobot dan Rating :

1. Penentuan bobot faktor strategis dengan skala dari 0,0 (tidak penting) sampai dengan 1,0 (sangat penting). Bobot mengindikasikan tingkat kepentingan faktor terhadap keberhasilan.
2. Pemberian rating faktor strategis untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh faktor kondisi organisasi.

Kekuatan	**Peluang**	**Kelemahan**	**Ancaman**
4 (sangat kuat)	4 (sangat berpeluang)	-1 (memberikan kelemahan yang kecil)	-1 (memberikan ancaman yang kecil)
3 (kuat)	3 (berpeluang)	-2 (memberikan kelemahan yang sedang)	-2 (memberikan ancaman yang sedang)
2 (rata-rata)	2 (rata-rata)	-3 (memberikan kelemahan yang besar)	-3 (memberikan ancaman yang besar)
1 (lemah)	1 (tidak berpeluang)	-4 (memberikan kelemahan yang sangat besar)	-4 (memberikan ancaman yang sangat besar)

bappelitbangda

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa :

a. Terdapat tiga indikator kekuatan yang menonjol adalah Tertuang dalam misi pertama Kabupaten Bandung Barat 2018-2023 : Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah telah mengalokasikan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). (Bantuan anak usia sekolah keluarga miskin), maupun pemberian beasiswa lainnya. Adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD pada misi 1 untuk mendukung dalam meningkatkan angka HLS dan RLS
b. Indikator kelemahan yang paling mempengaruhi indeks HLS dan RLS diantaranya 1) Ketidakakuratan Data usia wajib belajar. 2) Program kejar paket pemda tidak tepat sasaran. 3) Perizinan mendirikan PKBM terhambat. 4) Tidak ada regulasi mengenai anggaran yang mensupport PKBM. 5) Sekolah dan SDM yang tidak tersebar merata khususnya sekolah negeri (SD dan SMP). 6) Masih tingginya persentase tingkat penduduk miskin di KBB. 7) Ketidakmampuan keluarga menyekolahkan anak ke sekolah swasta akibat tidak diterima di sekolah negeri. 8) Ketergantungan (dependency ratio) masih tinggi, masih besarnya jumlah anggota keluarga/ yang mempengaruhi peluang anak untuk dapat meneruskan pendidikannya seperti mendukung anak untuk bekerja membantu orang tua bekerja daripada sekolah. 9) Aturan usia masuk SMPN dibatasi.
c. Indikator peluang yang paling mempengaruhi indeks HLS dan RLS diantaranya 1) Bidang pendidikan menjadi prioritas utama dalam pengembangan program-program pembangunan baik pada skala nasional maupun regional di tingkat kabupaten, sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran bahwa upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan menjadi kunci keberhasilan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. 2) Kegiatan pengelolaan pendidikan tingkat Kabupaten Bandung Barat kerap kali dikawal dengan lahirnya regulasi pengelolaan pendidikan baik yang diproduksi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bahkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Sebagai contoh, lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Permendiknas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sertifikasi Guru, dan Dosen menjadi bahan pertimbangan kebijakan dalam meningkatkan profesionalisme Guru dan Dosen di Kabupaten Bandung Barat. 3) Urgensi penunjang peningkatan mutu satuan pendidikan secara fisik dan non fisik. 4) Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan,

bappelitbangda

sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan akan pendidikan dikalangan masyarakat.

d. Indikator ancaman yang paling mempengaruhi indeks HLS dan RLS diantaranya 1) Banyaknya sekolah di Cimahi dan Kota Bandung yang menjadi tujuan sekolah warga KBB. 2) Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendidikan di daerah tertentu. 3) Faktor afirmasi, zonasi pada proses PPDB menghambat anak untuk sekolah akibat zonasi sehingga mempengaruhi angka putus sekolah. 4) Dampak pandemik covid 19 yang masih ada sehingga fokus pemerintah daerah masih mengutamakan pemulihan ekonomi sehingga anggaran yang diperuntukan untuk mendukung peningkatan indeks HLS dan RLS belum maksimal. 5) ketidakmampuan memanfaatkan pengaruh teknologi dalam proses pembelajaran.

Selanjutnya untuk mengetahui posisi tentang kondisi faktor internal dan eksternal dibuat diagram SWOT sebagaimana terdapat pada Gambar 5.1

bappelitbangda

Gambar 5. 1 Gambar Hasil Analisis SWOT

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan** 3,45	**Kelemahan** -3,72
Peluang 3,67	**Strategi SO** ---------- **Gunakan "S" untuk memanfaatkan "O"** Perluasan	**Strategi WO** ---------- **Menghilangkan "W" dan memanfaatkan "O"**
Ancaman -4,47	X= 0,07 Y= -0,83 Konsolidasi **Strategi ST** ---------- **Gunakan "S" untuk Menghindarkan "T"**	**Strategi WT** ---------- **Minimalkan "W" untuk Menghindarkan "T"**

Keterangan : S = Kekuatan, O = Peluang, W = Kelemahan, T = Ancaman

Pada Gambar 5.1 Diagram Hasil Analisis SWOT dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kuadran I, pada posisi ini merupakan suatu situasi dimana organisasi berada pada kondisi yang menguntungkan. Hal ini disebabkan organisasi memiliki kekuatan dan peluang yang mendorong untuk menangkap peluang yang ada. Strategi yang ada yakni Perluasan.
b. Kuadran 2. Pada posisi ini organisasi menghadapi berbagai ancaman tetapi masih memiliki kekuatan dari segi internal. Stragei yang paling tepat diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi Konsolidasi.
c. Kuadran 3, pada posisi ini organisasi menghadapi peluang pasar yang sangat besar dan dihadapkan pada kelemahan internal. Maka strategi yang harus diambil adalah strategi Konsolidasi.
d. Kuadran 4, pada posisi ini organisasi berada dalam kondisi paling buruk dimana organisasi menghadapi kelemahan internal sekaligus ancaman dari luar, sehingga strategi yang paling tepat adalah strategi Konsolidasi.

Berdasarkan diagram tersebut, proses peningkatan indeks HLS dan HLS yang di lakukan oleh KBB berada pada kuadran ke 2 dengan angka titik perpotangan antara nilai X 0,07 dan -0,83. Berada pada kuadran ke 2 menunjukan situasi dimana Pemerintah Daerah KBB memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mengahadapi ancaman dari luar, salah satu strategi yang dapat dilakukan yaitu melakukan strategi konsolidasi data dan informasi melalui pembentukan SATGAS untuk singkronisasi keakuratan data pendidkan secara sistematis dengan tujuan meningkatan indeks HLS dan RLS sebagai acuan dalam menentukan kebijakan.

Selanjutnya untuk menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi KBB dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya dibuat Matriks analisis sesuai dengan tabel 5.6. Dari tabel matriks analisis ini dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategis yang dapat digunakan untuk program peningkatan indeks HLS dan RLS.

bappelitbangda

Tabel 5. 7 Hasil Analisis Matrik IFAS dan EFAS

	IFAS (*Internal Strategic Factor Analysis Summary)*	
	STRENGTHS (S)	**WEAKNESS (W)**
	1. Adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD pada misi 1 untuk mendukung dalam meningkatkan angka HLS dan RLS 2. KBB memiliki PKBM yang cukup banyak jumlahnya 3. SDM Guru dan tenaga kependidikan yg cukup banyak 4. Tertuang dalam misi pertama Kabupaten Bandung Barat 2018-2023 : Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia di Bandung Barat yang berkualitas 5. Pemerintah telah mengalokasikan dana BOS (Belanja Operasional Sekolah), (Bantuan Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin), maupun pemberian beasiswa lainnya 6. Banyaknya institusi yang ada diwilayah KBB sehingga bisa dimanfaatkan dari CSR untuk mendukung program pendidikan 7. Banyaknya sekolah swasta di KBB	1. Kurangnya kesesuaian anggaran dalam mendukung peningkatan angka HLS dan RLS 2. ketidak akuratan data usia wajib belajar dari sumber terkait 3. Program kejar paket pemda tidak tepat sasaran 4. Perizinan mendirikan PKBM terhambat 5. Tidak ada regulasi mengenai anggaran yang mensupport PKBM 6. Sekolah dan SDM yang tidak tersebar merata khususnya sekolah negeri (SD dan SMP) 7. Masih tingginya persentase tingkat penduduk miskin di KBB. Ketidakmampuan keluarga menyekolahkan anak ke sekolah swasta akibat tidak diterima di sekolah negeri. 8. Ketergantungan (dependency ratio) masih tinggi, masih besarnya jumlah anggota keluarga/ yang mempengaruhi peluang anak untuk dapat meneruskan pendidikannya seperti mendukung anak untuk bekerja membantu orang tua bekerja daripada sekolah 9. Aturan pembatasan usia masuk SMPN

		10. Khusus siswa ABK beberapa sekolah tidak mampu menerima karena keterbatasan guru pendamping 11. Infrastruktur sekolah/ketersediaan sekolah tidak memadai dibandingkan daya tampung siswa SD yang besar sedangkan jumlah sekolah SMP N kecil. Pernyataan ini berdasarkan basis dapodik daya tampung SD vs SMP 12. Belum merata kualitas pendidikan di seluruh jenjang pendidikan 13. Belum merata kualifikasi tenaga pendidik di seluruh jenjang pendidikan. 14. Minim inovasi bidang pendidikan dalam proses pembelajaran 15. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki perangkat daerah dalam hal menunjang pelaksanaan pendidikan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. 16. Tidak meratanya lokasi tempat tinggal penduduk khususnya di wilayah yang memiliki aksesibilitas terbatas menyebabkan biaya tinggi untuk transportasi anak untuk sampai ke sekolah 17. Secara geografis KBB berbatasan langsung dengan kota Cimahi dan Kota Bandung 18. Masih banyak orang tua belum bisa baca tulis, tidak ada support kepada anak ketika anak kesuitan dalam pembelajaran.

	OPPORTUNITIES (O)	1. Adanya dana dari pusat yang bisa mendukung pemerintah daerah 2. Banyaknya program-program yang berkaitan dengan pendidikan dari pusat ataupun pemrov jabar untuk mendukung pemerintah daerah khusus nya bidang pendidikan seperti beasiswa, BOS dll 3. Bidang pendidikan menjadi prioritas utama dalam pengembangan program-program pembangunan baik pada skala nasional maupun regional di tingkat kabupaten, sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran bahwa upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan menjadi kunci keberhasilan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa 4. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perkembangan sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat 5. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan, sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan akan pendidikan di kalangan masyarakat 6. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang	**STRATEGI - SO** 1. Optimalisasi penggunaan ruang-ruang sekolah yang memiliki daya tampung yang besar namun jumlah minat siswa sekolah sedikit bagi SD maupun SMP. 2. Kebijakan pemberian BOS bagi SD dan SMP terutama sekolah swasta dilakukan pendampingan, pengawasan dan monitoring bagi yang memerlukan sehingga peruntukan lebih tepat sasaran untuk membantu siswa. 3. Melakukan kerjasama antara Pemda KBB dengan pihak swasta (perusahaan yang ada diwilayah KBB) dalam membangun kesepakatan mendukung perencanaan dan menyalurkan *corporate social responsibility* (CSR) di bidang pendidikan seperti menbangun sarana sekolah, pembiayaan bagi program Paket B, C, beasiswa siswa kurang mampu dll. 4. Apresiasi pemberian beasiswa pendidikan dasar (SD dan SMP) baik dari pusat, provinsi dan Pemda KBB bagi siswa berprestasi, dan kurang mampu berupa Beasiswa KIP. 5. Melakukan sosialisasi informasi wajib belajar 12 tahun lebih massive kepada masyarakat terutama didaerah yang memiliki indeks HLS dan RLS rendah seperti : Saguling, Rongga, Cipongkor, Cikalong Wetan, Cipatat, Gunung Halu dst, melalui media digital maupun konvensional, untuk	**STRATEGI - WO** 1. Pembentukan SATGAS untuk singkronisasi keakuratan data pendidkan secara sistematis untuk meningkatan indek HLS dan RLS. 2. Melakukan program Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidikan dibidang akademik maupun non akademik untuk mendukung kualitas pendidikan, melalalui pendidikan dan laitihan bekerja sama dengan perguruan tinggi diwilayah KBB dan sekitarnya. 3. Melakukan pemerataan guru di semua wilayah kecamatan dan desa di KBB tanpa kecuali, untuk tujuan pemerataan kualitas pendidikan. 4. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan PKBM untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan keaksaraan (memberantas buta aksara) khususnya bagi orang tua. 5. Melakukan pemanfaatan sekolah-sekolah dasar yang memiliki daya tampung besar sedangkan jumlah siswa sedikit untuk digunakan SMPN yang memiliki daya tampung terbatas. Dengan tujuan menanggulangi permasalahan keterbatasan jumlah sekolah SMPN di KBB dan pemerataan.

bappelitbangda

		positif bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan 7. Kegiatan pengelolaan pendidikan tingkat Kabupaten Bandung Barat kerap kali dikawal dengan lahirnya regulasi pengelolaan pendidikan baik yang diproduksi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bahkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Sebagai contoh, lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Permendiknas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sertifikasi Guru, dan Dosen menjadi bahan pertimbangan kebijakan dalam meningkatkan profesionalisme Guru dan Dosen di Kabupaten Bandung Barat 8. Urgensi penunjang peningkatan mutu satuan pendidikan secara fisik maupun non fisik	membangun dan menguatkan kesadaran pentingnya pendidikan sehingga angka putus sekolah dapat ditekan unsur-usnur yang relevan. 6. Melakukan sosialisasi informasi Paket B dan Paket C lebih massive kepada masyarakat khususnya bagi usia produktif terutama didaerah yang memiliki indeks HLS dan RLS rendah seperti: Saguling, Rongga, Cipongkor, Cikalong Wetan, Cipatat, Gunung Halu dst, melalui media digital maupun konvensional, untuk membangun dan menguatkan kesadaran pentingnya pendidikan sehingga angka putus sekolah dapat ditekan dan akan meningkatkan indeks RLS melalui unsur-usnur yang relevan. 7. Melakukan program Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan dibidang akademik maupun non akademik untuk mendukung kualitas pendidikan, melalalui pendidikan dan laitihan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan institusi bisnis yang relevan diwilayah KBB dan sekitarnya. 8. Melakukan pemerataan guru di semua wilayah kecamatan dan desa di KBB tanpa kecuali, untuk tujuan pemerataan kualitas pendidikan.	

bappeldabangda

		1. Dampak pandemik covid 19 yang masih ada sehingga fokus pemerintah daerah masih mengutamakan pemulihan ekonomi sehingga anggaran yang diperuntukan untuk mendukung peningkatan indeks HLS dan RLS belum maksimal 2. Masih ada budaya memperkerjakan anak di lahan pertanian di wilyah tertentu 3. Faktor afirmasi, zonasi pada proses PPDB menghambat anak untuk sekolah akibat zonasi sehingga mempengaruhi angka putus sekolah 4. Ketidak mampuan memanfaatkan teknologi di era global dalam proses pembelajaran 5. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendidikan di daerah tertentu **6.** Banyak sekolah di Cimahi dan kota Bandung yang menjadi tujuan sekolah warga KBB	**STRATEGI - ST** 1. Melakukan sosialisasi informasi wajib belajar 12 tahun lebih massive kepada masyarakat terutama di daerah yang memiliki indeks HLS dan RLS rendah seperti : Saguling, Rongga, Cipongkor, Cikalong wetan, Cipatat, Gunung Halu dst, melalui media digital maupun konvensional, untuk membangun dan menguatkan kesadaran pentingnya pendidikan sehingga angka putus sekolah dapat ditekan. 2. Melakukan kerjasama antara Pemda KBB dengan pihak swasta (perusahaan yang ada di wilayah KBB) dalam membangun kesepakatan mendukung perencanaan strategis pembangunan khususnya bidang pendidikan dengan ikut memberikan timbal balik berupa *corporate social responsibility* (CSR) di bidang pendidikan seperti membangun sarana sekolah, pembiayaan bagi program Paket B, Paket C, beasiswa siswa kurang mampu dll. 3. Kebijakan pemberian BOS bagi SD dan SMP terutama sekolah swasta dilakukan pendampingan dan pengawasan sehingga peruntukan lebih tepat sasaran membantu siswa. 4. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan PKBM untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan keaksaraan (memberantas buta aksara) khususnya bagi orang tua. Sosialisasi pendampingan	**STRATEGI – WT** 1. Melakukan kerjasama antara Pemda KBB dengan pihak swasta (perusahaan yang ada di wilayah KBB) dalam membangun kesepakatan mendukung perencanaan strategis pembangunan khususnya bidang pendidikan dengan ikut memberikan timbal balik berupa *corporate social responsibility* (CSR) di bidang pendidikan seperti menbangun sarana sekolah, pembiayaan bagi program Paket B, Paket C, beasiswa siswa kurang mampu dll. 2. Melakukan pemanfaatan sekolah-sekolah dasar yang memiliki daya tampung besar sedangkan jumlah siswa sedikit untuk digunakan SMPN yang memiliki daya tampung terbatas. Dengan tujuan menanggulangi permasalahan keterbatasan jumlah sekolah SMPN di KBB dan pemerataan. 3. Melakukan program Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan dibidang akademik maupun non akademik untuk mendukung kualitas pendidikan, melalui pendidikan dan latihan bekerja sama dengan perguruan tinggi diwilayah KBB dan sekitarnya

bappelitbangda

			masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.	

bappelitbangda

Dalam analisis matriks SWOT terjadi interaksi penggabungan dari strategi yang meliputi kontribusi interaksi strategi internal- eksteral yang terdiri dari :

1. Strategi SO (Streght-Opportunity). Ciptakan strategi untuk memanfaatkan peluang.
2. Strategi ST (Strenght- Threat). Ciptakan stratgei yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
3. Stratregi WO (Weakness-Opportunity). Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menciptakan peluang
4. Strategi WT (Weakness-Threat). Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

1. Kuadran I : Mendukung Strategi SO

Dengan kekuatan yang dimilki untuk meraih keuntungan dari peluang yang ada merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena organsasi memiliki peluang dan kekuatan sehingga menfaatkan peluang yang ada.

Strategi yang harus diterapkan adalah **a)** melakukan optimalisasi penggunaan ruang-ruang sekolah yang memiliki daya tampung yang besar namun jumlah minat siswa sekolah sedikit bagi SD maupun SMP. **b)** Membuat Kebijakan pemberian BOS bagi SD dan SMP terutama sekolah swasta dilakukan pendampingan , pengawasan dan monitoring bagi yang memerlukan sehingga peruntukan lebih tepat sasaran untuk membantu siswa**. c)** Melakukan kerjasama antara Pemda KBB dengan pihak swasta (perusahaan yang ada diwilayah KBB) dalam membangun kesepakatan mendukung perencanaan strategis pembangunan khususnya bidang pendidikan dengan ikut memberikan timbal balik berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bidang pendidikan seperti membangun sarana sekolah, pembiayaan bagi program Paket B, Paket C, beasiswa siswa kurang mampu dll**. d)** Apresiasi pemberian beasiswa pendidikan dasar (SD dan SMP) baik dari pusat, provinsi dan Pemda KBB bagi siswa berprestasi, dan kurang mampu berupa Beasiswa KIP**. e)** Melakukan sosialisasi informasi wajib belajar 12 tahun lebih massive kepada masyarakat terutama didaerah yang memiliki indeks HLS dan RLS rendah seperti : Saguling, Rongga, Cipongkor, Cikalong Wetan, Cipatat, Gunung Halu dst, melalui media digital maupun konvensional, untuk membangun dan menguatkan kesadaran pentingnya pendidikan sehingga angka putus sekolah dapat ditekan. **f).** Melakukan sosialisasi informasi Paket B dan Paket C lebih massive kepada masyarakat khususnya bagi usia produktif terutama didaerah yang memiliki indeks HLS dan RLS rendah seperti : Saguling, Rongga, Cipongkor, Cikalong Wetan, Cipatat, Gunung Halu dst, melalui media digital

bappelitbangda

maupun konvensional, untuk membangun dan menguatkan kesadaran pentingnya pendidikan sehingga angka putus sekolah dapat ditekan dan akan meningkatkan indeks RLS melalui unsur-unsur yang relevan. **g)**. Melakukan program peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan dibidang akademik maupun non akademik untuk mendukung kualitas pendidikan, melalui pendidikan dan laitihan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan institusi bisnis yang relevan di wilayah KBB dan sekitarnya. **h)**. Melakukan pemerataan guru di semua wilayah kecamatan dan desa di KBB tanpa kecuali, untuk tujuan pemerataan kualitas pendidikan.

2. Kuadran II : Mendukung Strategi ST

Dengan kekuatan yang ada untuk mengantisipasi ancaman/tantangan. Meskipun menghadapi ancaman, organisasi ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi di verifikasi.

Strategi yang harus diterapkan adalah **a)**. Melakukan sosialisasi informasi wajib belajar 12 tahun lebih massive kepada masyarakat terutama didaerah yang memiliki indeks HLS dan RLS rendah seperti : Saguling, Rongga, Cipongkor, Cikalong Wetan, Cipatat, Gunung Halu dst, melalui media digital maupun konvensional, untuk membangun dan menguatkan kesadaran pentingnya pendidikan sehingga angka putus sekolah dapat ditekan. **b)**. Melakukan kerjasama antara Pemda KBB dengan pihak swasta (perusahaan yang ada diwilayah KBB) dalam membangun kesepakatan mendukung perencanaan strategis pembangunan khususnya bidang pendidikan dengan ikut memberikan timbal balik berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bidang pendidikan seperti menbangun sarana sekolah, pembiayaan bagi program Paket B, Paket C, beasiswa kurang mampu dll. **c)**. Kebijakan pemberian BOS bagi SD dan SMP terutama sekolah swasta dilakukan pendampingan dan pengawasan sehingga peruntukan lebih tepat sasaran membantu siswa. **d).** Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan PKBM untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan keaksaraan (memberantas buta aksara) khususnya bagi orang tua. Sosialisasi pendampingan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.

bappelitbangda

3. Kuadran III : Mendukung Strategi WO

Memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan keuntungan dari peluang yang ada. Organisasi menghadapi peluang yang besar, tetapi dilain pihak organisasi menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal.

Strategi yang harus diterapkan yaitu **a)**. Pembentukan SATGAS untuk singkronisasi keakuratan data pendidkan secara sistematis untuk meningkatan indek HLS dan RLS. **b)**. Melakukan program peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan dibidang akademik maupun non akademik untuk mendukung kualitas pendidikan, melalalui pendidikan dan laitihan bekerja sama dengan perguruan tinggi diwilayah KBB dan sekitarnya. **c)**. Melakukan pemerataan guru di semua wilayah kecamatan dan desa di KBB tanpa kecuali, untuk tujuan pemerataan kualitas pendidikan. **d)**. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan PKBM untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan keaksaraan (memberantas buta aksara) khususnya bagi orang tua. **e).** Melakukan pemanfaatan sekolah-sekolah dasar yang memiliki daya tampung besar sedangkan jumlah siswa sedikit untuk digunakan SMPN yang memiliki daya tampung terbatas. Dengan tujuan menanggulangi permasalahan keterbatasan dan pemerataan jumlah sekolah SMPN di KBB.

4. Kuadran IV : Mendukung Strategi WT

Meminimalisasi kelemahan dan menghindari ancaman/tantangan. Organisasi berada dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan, menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Organisasi harus melakukan strategi bertahan (defensive) agar organisasi tetap tetap eksis, dengan melakukan berbagai pembenahan internal guna menghadapi ancaman yang akan datang.

Strategi yang haris diterapkan diantaranya **a).** Melakukan kerjasama antara Pemda KBB dengan pihak swasta (perusahaan yang ada diwilayah KBB) dalam membangun kesepakatan mendukung perencanaan strategis pembangunan dan menyalurkan *corporate social responsibility* (CSR) di bidang pendidikan seperti membangun sarana sekolah, pembiayaan bagi program Paket B, Paket C, beasiswa siswa kurang mampu dll. **b)**. Melakukan pemanfaatan sekolah-sekolah dasar yang memiliki daya tampung besar sedangkan jumlah siswa sedikit untuk digunakan SMPN yang memiliki daya tampung terbatas. Dengan tujuan menanggulangi permasalahan keterbatasan dan pemerataan jumlah sekolah SMPN di KBB. **c)**. Melakukan program peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan dibidang akademik maupun non akademik untuk mendukung

bappelitbangda

kualitas pendidikan, melalui pendidikan dan latihan bekerja sama dengan perguruan tinggi diwilayah KBB dan sekeitarnya. **d)**. Melakukan sosialisasi informasi wajib belajar 12 tahun lebih massive kepada masyarakat terutama di daerah yang memiliki indeks HLS dan RLS rendah seperti : Saguling, Rongga, Cipongkor, Cikalong Wetan, Cipatat, Gunung Halu dst, melalui media digital maupun konvensional, untuk membangun dan menguatkan kesadaran pentingnya pendidikan sehingga angka putus sekolah dapat ditekan.

Selanjutnya dari seluruh strategi yang telah dirumuskan dilakukan pemeringkatan dan penentuan skala prioritas dari strategi yang akan di tindaklanjuti serta diimplementasikan dalam upaya peningkatan indeks HLS dan RLS di KBB. Hasil pemeringkatan dan urutan skala prioritas strategi dapat dilihat di Tabel 5. 8 Prioritas Strategi Peningkatan Indeks HLS dan RLS.

Tabel 5. 8 Prioritas Strategi Peningkatan Indeks HLS dan RLS

NO	STRATEGI	RATING	SKALA PRIORITAS
1	Pembentukan SATGAS untuk singkronisasi keakuratan data pendidkan secara sistematis untuk meningkatan indeks HLS dan RLS sebagai acuan dalam menentukan kebijakan	5	1
2	Melakukan sosialisasi informasi Paket B dan C lebih massive dalam rangka optimalisasi program belajar 12 tahun kepada masyarakat khususnya bagi usia produktif terutama didaerah yang memiliki indeks HLS dan RLS rendah untuk membangun dan menguatkan kesadaran pentingnya pendidikan sehingga angka putus sekolah dapat ditekan	5	2
3	Pengusulan peninjauan ulang kebijakan tahapan PPDB dan batas usia agar dapat meningkatkan jumlah partisipasi sekolah di Kabupaten Bandung Barat	5	3
4	Melakukan pemanfaatan sekolah-sekolah dasar dan Menengah untuk dimanfaatkan oleh PKBM yang terkendala Sarana dan Prasarana. Dengan tujuan menanggulangi permasalahan pemerataan dan keterbatasan jumlah PKBM di KBB	5	4
5	Melakukan kerjasama antara Pemda KBB dengan pihak swasta (perusahaan yang ada diwilayah KBB) untuk menghimpun dana CSR yang dialokasikan untuk program pendidikan dan bekerja sama dengan perguruan tingi untuk melakukan pengabdian di Kabupaten Bandung Barat	5	5

bappelitbangda

B. Pembahasan

Pemetaan Teknis Strategi Peningkatan HLS dan RLS

Strategi 1

Pembentukan SATGAS untuk singkronisasi keakuratan data pendidikan secara sistematis untuk meningkatan indeks HLS dan RLS sebagai acuan dalam menentukan kebijakan Pemilihan satgas kompeten dan profesional khusus untuk singkronisasi data pendidikan

- Pemilihan satgas kompeten dan profesional khusus untuk singkronisasi data pendidikan
- Setiap satgas harus berkoordinasi dan mengakomodir data pedidikan dengan kementrian agama, dinas pendidikan, dinas kependudukan, dinas tenaga kerja dan dinas-dinas terkait, serta PKK tingkat desa.
- Data yang dihimpun diantaranya data jumlah putus sekolah, data jumlah pesantren formal maupun informal, data usia sekolah yang bekerja dan data yang sekolah di luar KBB.
- Setelah data terkumpul diolah menjadi data acuan pendidikan yang bisa dipertanggung jawabkan.

Strategi 2

Melakukan sosialisasi informasi Paket B dan C lebih massive dalam rangka optimalisasi program belajar 12 tahun kepada masyarakat khususnya bagi usia produktif terutama didaerah yang memiliki indeks HLS dan RLS rendah untuk membangun dan menguatkan kesadaran pentingnya pendidikan sehingga angka putus sekolah dapat ditekan serta merumuskan bahan dan output dari sosialisasi informasi wajib belajar 12 tahun

- Satgas melakukan pendataan jumlah putus sekolah terbanyak pada jenjang mana, bisa bekerjasama dengan PKK tingkat Desa, Disdukcapil, dsb.
- PKBM bekerja sama dengan Pesantren Non-Formal dan Disnaker untuk mendorong warga usia sekolah yang tidak sekolah untuk mengikuti program kejar paket
- Satgas merumuskan bahan serta output dari sosialisasi ini
- Satgas menyiapkan anggaran PKBM baik dari APBD/BOP untuk usia 21 tahun kebawah atau dari APBD/APBD Provinsi/ CSR untuk usia 21 tahun ke atas sehingga biaya bisa di penuhi

bappelitbangda

Strategi 3

Pengusulan peninjauan ulang kebijakan tahapan PPDB dan batas usia agar dapat meningkatkan jumlah partisipasi sekolah di Kabupaten Bandung Barat

- Dinas pendidikan mengusulkan kebijakan batas usia kepada kementerian pendidikan untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang bersekolah
- Dinas Pendidikan membantu mengevaluasi keberjalanan PPDB 1 tahap tahun ini, dan memberikan solusi atau usulan agar kegiatan PPDB tidak selalu bermasalah dan dapat meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat yang bersekolah apakah kembali melakukan PPDB sebanyak 2 tahap atau 3 tahap
- Satgas membantu keberjalanan Program PPDB

Strategi 4

Melakukan pemanfaatan sekolah-sekolah dasar dan Menengah untuk dimanfaatkan oleh PKBM yang terkendala Sarana dan Prasarana. Dengan tujuan menanggulangi permasalahan pemerataan dan keterbatasan jumlah PKBM di KBB.

- Satgas melakukan pendataan sekolah sekolah Dasar yang memiliki daya tampung besar
- Satgas menyiapkan ijin operasional, SDM, untuk membuat kerjasama dengan sekolah-sekolah terlibat
- PKBM mengatur waktu pembelajaran
- PKBM harus bekerjasama dengan Pesantren Non-Formal dan Disnaker
- PKBM membuat Marketing yang menarik seperti design, konten, dan potongan biaya agar masyarakat yang tidak bersekolah tertarik untuk ikut PKBM

Strategi 5

Melakukan kerjasama antara Pemda KBB dengan pihak swasta (perusahaan yang ada diwilayah KBB) untuk menghimpun dana CSR yang dialokasikan untuk program pendidikan dan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan pengabdian di Kabupaten Bandung Barat

- Satgas bertanggung jawab dalam penarikan dana CSR atau pembagian persentasi terhadap CSR yang sudah dihimpun oleh Pemkab untuk dialokasikan terhadap pendidikan
- Bappelitbangda Membantu dalam Proses Anggaran dan MOU dengan Institusi perusahaan dan Perguruan Tinggi

bappelitbangda

- Satgas Mengaudit Keuangan CSR baik terhadap PKBM, Sekolah, Kecamatan, lembaga beasiswa dan lain sebagainya yang menerima dana bantuan CSR

Strategi yang telah dibuat kemudian diturunkan menjadi arah kebijakan yang dapat diambil oleh Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan Indeks HLS dan RLS diantara sebagai berikut.

Tabel 5. 9 Strategi dan Arah Kebijakan dalam meningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah	Arah Kebijakan
Meningkatnya Indeks Pendidikan, dengan Indikator: a. Harapan Lama Sekolah b. Rata-rata Lama Sekolah	Pembentukan SATGAS untuk singkronisasi keakuratan data pendidikan secara sistematis untuk meningkatan indeks HLS dan RLS sebagai acuan dalam menentukan kebijakan	• Dinas Pendidikan • Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan penelitian Daerah	• Membentuk Satgas profesional dan kompeten dalam pengumpulan dan validasi data pendidikan • Membuka dan memberikan akses terkait data pendidikan • Inventarisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana per sekolah, terkait kebutuhan RKB, utilitas sekolah, rehabilitasi, dan lain-lain
	Melakukan sosialisasi informasi Paket B dan C lebih massive dalam rangka optimalisasi program belajar 12 tahun kepada masyarakat khususnya bagi usia produktif terutama didaerah yang memiliki indeks HLS dan RLS rendah untuk membangun dan menguatkan kesadaran pentingnya pendidikan	• Dinas Pendidikan	• Penguatan Kelembagaan Paket A/B/C • Inventarisasi Anak Tidak Sekolah (ATS) dan memasukkannya kedalam Program Kesetaraan, Program Keaksaraan atau Program Kursus dan Keterampilan serta “gerakan kembali ke sekolah”

bappelitbangda

Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah	Arah Kebijakan
	Pengusulan peninjauan ulang kebijakan tahapan PPDB dan batas usia agar dapat meningkatkan jumlah partisipasi sekolah di Kabupaten Bandung Barat	• Dinas Pendidikan • Dinas PUTR	• Menjamin kepastian daya tampung sekolah menengah pertama dengan menambah ruang kelas baru dan memperhatikan basis zonasi kewilayahan.
	Melakukan pemanfaatan sekolah-sekolah dasar dan Menengah untuk dimanfaatkan oleh PKBM yang terkendala Sarana dan Prasarana. Dengan tujuan menanggulangi permasalahan pemerataan dan keterbatasan jumlah PKBM di KBB.	• Dinas Pendidikan	• Melaksanakan pembinaan kelembagaan, menyiapkan pelaksanaan fasilitasi akreditasi, serta pelaksanaan fasilitasi pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan • Penguatan kelembagaan satuan pendidikan nonformal dengan menjamin legalitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan masyarakat dan mempunyai nomor pokok satuan pendidikan nasional, penyiapan akreditasi satuan pendidikan nonformal serta mendorong Yayasan/Pengelola Satuan Pendidikan Nonformal untuk dapat meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarananya;
	Melakukan kerjasama antara Pemda KBB dengan pihak	• Dinas Pendidikan • Sekretariat Daerah	• Membuka akses satuan pendidikan dan guru pada pembiayaan di luar

bappelitbangda

Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah	Arah Kebijakan
	swasta (perusahaan yang ada diwilayah KBB) untuk menghimpun dana CSR yang dialokasikan untuk program pendidikan dan bekerja sama dengan perguruan tingi untuk melakukan pengabdian di Kabupaten Bandung Barat		APBD seperti: pembiayaan oleh, pihak ke-3 (contoh: CSR, investasi DU/DI) • Membangun Kerjasama Dengan Perguruan tinggi



Gambar 5. 2 Timeline Strategi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bandung Barat



2022

BAB 6

KESIMPULAN

Kajian Penyusunan Strategi Daerah
Untuk Meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bandung Barat

BAB - 6
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap beberapa perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam ranah pendidikan. Maka dapat disimpulkan strategi-strategi alternatif sementara yang dapat diterapkan untuk meningkatkan indeks HLS dan RLS sebagai berikut.

1) Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021 memiliki capai Indeks HLS 11,88 menduduki peringkat dua terendah dari 27 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Sementara capaian Indeks RLS di Kabupaten Bandung Barat 8,2 menduduki peringkat 14 dari 27 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
2) Rendahnya capaian indeks HLS dan RLS tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya a) masih kurang validnya data pendidikan yang menyebabkan kebijakan yang telah diambil kurang tepat sasaran, b) Minimnya ketertarikan dan partisipasi masyarakat dalam program paket karena menganggap pendidikan kurang penting, c) Proses tahapan dan kebijakan PPDB yang selalu bermasalah dalam setiap pelaksanaanya, d) sulitnya ijin PKBM dan sarana prasarana dalam menunjang kegiatan PKBM di Kabupaten Bandung Barat, e) Kurangnya dana dan kegiatan dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Barat.
3) Dibuat tahapan dan strategi untuk mengatasi masalah yang timbul dalam peningkatan RLS dan HLS yang didasarkan pada hasil analisis SWOT yang telah dilakukan terhadap beberapa Perangkat Daerah dengan menghasilkan beberapa strategi diantaranya:
    a. Pembentukan SATGAS untuk singkronisasi keakuratan data pendidkan secara sistematis untuk meningkatan indeks HLS dan RLS sebagai acuan dalam menentukan kebijakan
    b. Melakukan sosialisasi informasi Paket B dan C lebih massive dalam rangka optimalisasi program belajar 12 tahun kepada masyarakat khususnya bagi usia produktif terutama didaerah yang memiliki indeks HLS dan RLS rendah untuk membangun dan menguatkan kesadaran pentingnya pendidikan sehingga angka putus sekolah dapat ditekan
    c. Pengusulan peninjauan ulang kebijakan tahapan PPDB dan batas usia agar dapat meningkatkan jumlah partisipasi sekolah di Kabupaten Bandung Barat
    d. Melakukan pemanfaatan sekolah-sekolah dasar dan Menengah untuk dimanfaatkan oleh PKBM yang terkendala Sarana dan Prasarana. Dengan

bappelitbangda

tujuan menanggulangi permasalahan pemerataan dan keterbatasan jumlah PKBM di KBB

e. Melakukan kerjasama antara Pemda KBB dengan pihak swasta (perusahaan yang ada diwilayah KBB) untuk menghimpun dana CSR yang dialokasikan untuk program pendidikan dan bekerja sama dengan perguruan tingi untuk melakukan pengabdian di Kabupaten Bandung Barat

4) Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan maka perlu didukung oleh bebrapa arah kebijakan, diantaranya sebagai berikut:
   a. Membentuk Satgas profesinal dan kompeten dalam pengumpulan dan validasi data pendidikan
   b. Membuka dan memberikan akses terkait data pendidikan
   c. Penguatan Kelembagaan Paket A/B/C
   d. Inventarisasi Anak Tidak Sekolah (ATS) dan memasukkannya kedalam Program Kesetaraan, Program Keaksaraan atau Program Kursus dan Keterampilan serta “gerakan kembali ke sekolah”
   e. Inventarisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana per sekolah, terkait kebutuhan RKB, utilitas sekolah, rehabilitasi, dan lain-lain.
   f. Menjamin kepastian daya tampung sekolah menengah pertama dengan menambah ruang kelas baru dan memperhatikan basis zonasi kewilayahan.
   g. Melaksanakan pembinaan kelembagaan, menyiapkan pelaksanaan fasilitasi akreditasi, serta pelaksanaan fasilitasi pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan
   h. Penguatan kelembagaan satuan pendidikan nonformal dengan menjamin legalitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan masyarakat dan mempunyai nomor pokok satuan pendidikan nasional, penyiapan akreditasi satuan pendidikan nonformal serta mendorong Yayasan/Pengelola Satuan Pendidikan Nonformal untuk dapat meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarananya;
   i. Membuka akses satuan pendidikan dan guru pada pembiayaan di luar APBD seperti: pembiayaan oleh, pihak ke-3 (contoh: CSR, investasi DU/DI)
   j. Membangun Kerjasama Dengan Perguruan tinggi

bappelitbangda

Daftar Pustaka

Bafadal, Ibrahim. 2003. Manajemen Perlengkapan Sekolah, Teori dan Aplikasinya. Jakarta: Bumi Aksara.

Fattah, Nanang. (2004). Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah. Bandung: CV Pustaka Bani Quraisy.

Fattah, Nanang. (2009). Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Rosda Karya.

Kristiawan, M. (2017). Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Budi Utama.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Barat.

Profil dan Statistika Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021.

Rahminawati, N. (2016). Manajemen Pendidikan. *Universitas Islam Bandung*.

Rahminawati, N. (2021). Bahan Ajar Manajemen Pendidikan. *Bandung: Unisba*.

Rencana Strategis Pendidikan 2020-2024 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Rencana Strategis Pendidikan 2018-2023 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Rencana Startegis Pendidikan 2021-2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia

bappelitbangda

Lampiran-Lampiran

bappelitbangda

Lampran 1. Dokumentasi Kegiatan FGD





Laporan 2. Dokumentasi Kegiatan Presentasi Laporan Akhir





Lampiran 3. Data Dukung HLS dan RLS Tahun 2022

NO	JENJANG/ STATUS	JUMLAH SISWA	SISWA KELAS TERAKHIR, THN SEBELUMNYA	JUMLAH ROMBEL/KELAS	LULUSAN	SISWA BARU KELAS 1
1	SD NEGERI	150.049	24.528	5.114	24.528	
2	SD SWASTA	10.239	1.433	392	1.397	
3	MI NEGERI	1.204	244	43	174	
4	MI SWASTA	31.641	4.816	1.535	4.585	
	J U M L A H	**193.133**	**31.021**	**7.084**	**30.684**	
5	SMP NEGERI	39.398	13.039	1.203	13.037	13.203
6	SMP SWASTA	23.732	7.612	801	7.611	7.848
7	MTs NEGERI	2.621	869	66	876	839
8	MTs SWASTA	22.136	7.544	879	6.965	7.320
	J U M L A H	**87.887**	**29.064**	**2.949**	**28.489**	**29.210**
9	SMA NEGERI					5613
10	SMA SWASTA					3689
11	MA NEGERI					318
12	MA SWASTA					2963
13	SMK NEGERI					2571
14	SMK SWASTA					8711
	J U M L A H					**23865**

Catatan :

1 **Angka Melanjutkan dari SD ke SMP/MTs**

Lulusan SD+MI	30.684
Siswa Baru SMP+MTs	29.210
Angka Melanjutkan (%)	95%

1 **Angka Melanjutkan dari SMP ke SM (SEKOLAH MENENGAH)**

Lulusan SMP+MTs	28.489
Siswa Baru SMP+MTs	23.865
Angka Melanjutkan (%)	84%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

bappelitbangda

Lampiran 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG BARAT
Gd. C Lt. 1 Komplek Pemkab Bandung Barat

KODE PUM	KECAMATAN	Luas Wilayah	Penduduk Seluruhnya	Penduduk <5 tahun			Penduduk 5-6 tahun			Penduduk 7-12 tahun			Penduduk 13-15 tahun			Penduduk 16-18 tahun		
				L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	LEMBANG	32,04	194.937	7.579	7.106	14.685	3.430	3.327	6.757	10.915	10.275	21.190	5.537	5.058	10.595	3.919	3.943	7.862
2	PARONGPONG	46,99	110.537	4.151	3.854	8.005	2.057	1.849	3.906	6.099	5.711	11.810	2.914	2.842	5.756	2.236	2.259	4.495
3	CISARUA	112,93	79.118	3.084	2.884	5.968	1.436	1.353	2.789	4.395	4.127	8.522	2.019	1.981	4.000	1.519	1.504	3.023
4	CIKALONGWETAN	77,79	125.630	5.211	4.982	10.193	2.265	2.290	4.555	7.377	7.063	14.440	3.511	3.311	6.822	2.573	2.467	5.040
5	CIPEUNDEUY	126,05	87.376	3.529	3.363	6.892	1.588	1.450	3.038	5.017	4.782	9.799	2.289	2.245	4.534	1.732	1.706	3.438
6	NGAMPRAH	101,09	175.874	6.600	6.183	12.783	2.971	2.788	5.759	9.726	8.986	18.712	4.773	4.452	9.225	3.932	3.822	7.754
7	CIPATAT	79,96	141.789	6.069	5.742	11.811	2.731	2.522	5.253	8.378	7.863	16.241	4.029	3.790	7.819	2.916	3.009	5.925
8	PADALARANG	55,11	182.981	7.310	6.749	14.059	3.212	3.109	6.321	10.515	9.774	20.289	5.118	4.781	9.899	4.021	3.832	7.853
09	BATUJAJAR	160,64	108.579	4.473	4.215	8.688	1.998	1.954	3.952	6.468	5.792	12.260	3.109	2.957	6.066	2.362	2.376	4.738
10	CIHAMPELAS	95,56	133.684	6.181	5.690	11.871	2.704	2.585	5.289	8.339	7.623	15.962	3.876	3.506	7.382	2.795	2.813	5.608
11	CILILIN	36,01	96.128	4.184	3.841	8.025	1.900	1.730	3.630	5.739	5.319	11.058	2.674	2.568	5.242	1.950	1.881	3.831
12	CIPONGKOR	51,4	99.797	4.832	4.362	9.194	2.142	2.054	4.196	6.176	5.829	12.005	2.958	2.736	5.694	1.982	1.960	3.942
13	RONGGA	45,15	58.998	2.547	2.385	4.932	1.128	1.110	2.238	3.317	3.011	6.328	1.605	1.517	3.122	1.082	1.029	2.111
14	SINDANGKERTA	113,12	73.122	3.198	3.104	6.302	1.444	1.331	2.775	4.154	3.978	8.132	1.929	1.950	3.879	1.466	1.391	2.857
15	GUNUNGHALU	51,46	77.912	3.117	2.855	5.972	1.416	1.299	2.715	4.161	3.960	8.121	2.010	1.842	3.852	1.506	1.473	2.979
16	SAGULING	120,47	34.305	1.511	1.417	2.928	644	632	1.276	2.020	1.924	3.944	919	783	1.702	640	579	1.219
BANDUNG BARAT		1305,77	1.780.767	73.576	68.732	142.308	33.066	31.383	64.449	102.796	96.017	198.813	49.270	46.319	95.589	36.631	36.044	72.675

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022

bappelitbangda

Lampiran 5. Data Indeks Rata-rata Lama Sekolah

Kode	Kab/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0000	NASIONAL	7,95	8,10	8,17	8,34	8,48	8,54
3200	JAWA BARAT	7,95	8,14	8,15	8,37	8,55	8,61
3201	Bogor	7,83	7,84	7,88	8,29	8,3	3,3
3202	Sukabumi	6,74	6,79	6,80	7,02	7,07	7,1
3203	Cianjur	6,61	6,92	6,93	6,97	7,18	7,19
3204	Bandung	8,50	8,51	8,58	8,79	8,96	9,07
3205	Garut	6,88	7,28	7,50	7,51	7,52	7,53
3206	Tasikmalaya	6,94	7,12	7,13	7,17	7,35	7,71
3207	Ciamis	7,55	7,59	7,60	7,69	7,7	8,31
3208	Kuningan	7,34	7,35	7,36	7,38	7,57	7,8
3209	Cirebon	6,41	6,61	6,62	6,71	6,92	7,1
3210	Majalengka	6,89	6,90	6,91	7,09	7,27	7,31
3211	Sumedang	7,72	7,98	8,17	8,27	8,51	8,51
3212	Indramayu	5,56	5,97	5,98	5,99	6,3	6,52
3213	Subang	6,58	6,83	6,84	6,85	7,1	7,11
3214	Purwakarta	7,42	7,74	7,75	7,92	8,09	8,1
3215	Karawang	6,94	7,34	7,35	7,65	7,77	7,78
3216	Bekasi	8,81	8,82	8,84	8,84	9,12	9,3
3217	Bandung Barat	7,63	7,74	7,97	8,18	8,19	8,2
3218	Pangandaran	7,07	7,37	7,58	7,67	7,74	7,85
3271	Kota Bogor	10,28	10,29	10,30	10,32	10,33	10,53
3272	Kota Sukabumi	9,28	9,52	9,53	9,58	9,59	9,81
3273	Kota Bandung	10,58	10,59	10,63	10,74	10,75	10,99
3274	Kota Cirebon	9,87	9,88	9,89	9,9	9,91	10,12
3275	Kota Bekasi	10,78	10,93	11,09	11,1	11,16	11,31
3276	Kota Depok	10,76	10,84	10,85	11	11,28	11,46
3277	Kota Cimahi	10,89	10,93	10,94	10,95	10,96	11,08
3278	Kota Tasikmalaya	8,63	9,03	9,04	9,13	9,33	9,52
3279	Kota Banjar	8,19	8,59	8,60	8,62	8,63	8,77

Sumber : sync.disdik.jabarprov.go.id

bappelitbangda

Lampiran 6. Data Indeks Harapan Lama Sekolah

Kode	Wilayah Jawa Barat	Harapan Lama Sekolah					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0000	Nasional	12.72	12.85	12.91	12.95	12.98	13.08
3200	Provinsi Jawa Barat	12.30	12.42	12.45	12.48	12.50	12.61
3201	Bogor	12.05	12.43	12.44	12.47	12.48	12.49
3202	Sukabumi	12.18	12.19	12.20	12.22	12.23	12.24
3203	Cianjur	11.88	11.89	11.90	11.98	11.99	12.00
3204	Bandung	12.42	12.43	12.64	12.68	12.69	12.70
3205	Garut	11.69	11.73	11.80	11.82	11.91	12.03
3206	Tasikmalaya	12.46	12.47	12.48	12.52	12.53	12.54
3207	Ciamis	13.65	13.66	13.67	13.79	14.06	14.20
3208	Kuningan	12.04	12.06	12.07	12.10	12.22	12.23
3209	Cirebon	12.03	12.21	12.22	12.24	12.25	12.27
3210	Majalengka	11.89	12.18	12.19	12.21	12.22	12.23
3211	Sumedang	12.91	12.93	12.94	12.96	12.97	12.98
3212	Indramayu	12.20	12.21	12.22	12.24	12.25	12.26
3213	Subang	11.66	11.67	11.68	11.69	11.70	11.71
3214	Purwakarta	11.82	11.89	12.09	12.10	12.11	12.12
3215	Karawang	11.85	11.96	12.07	12.08	12.09	12.10
3216	Bekasi	12.23	12.63	13.05	13.08	13.09	13.10
3217	Bandung Barat	11.56	11.79	11.83	11.86	11.87	11.88
3218	Pangandaran	12.02	12.03	12.04	12.06	12.07	12.08
3271	Kota Bogor	13.01	13.37	13.38	13.40	13.41	13.42
3272	Kota Sukabumi	13.38	13.39	13.40	13.46	13.47	13.58
3273	Kota Bandung	13.89	13.90	14.18	14.19	14.20	14.21
3274	Kota Cirebon	13.07	13.08	13.09	13.11	13.12	13.13
3275	Kota Bekasi	13.47	13.51	13.76	13.99	14.00	14.10
3276	Kota Depok	13.86	13.87	13.90	13.91	13.92	13.93
3277	Kota Cimahi	13.75	13.76	13.77	13.79	13.80	13.81
3278	Kota Tasikmalaya	13.40	13.41	13.42	13.44	13.45	13.46
3279	Kota Banjar	13.18	13.19	13.20	13.22	13.23	13.24

Sumber : sync.disdik.jabarprov.go.id

bappelitbangda